



BULETIN

KETENAGALISTRIKAN

Edisi 66 Volume XVII / Juni 2021



8

KEMENTERIAN ESDM DAN KEMENDAG
TERTIBKAN STOP KONTAK
TAK SESUAI SNI

24

TRANSISI ENERGI BERSIH MELALUI
KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK

42

JADI PELUANG BISNIS,
KEMENTERIAN ESDM DORONG
PENGOPERASIAN SPKLU

26

SUSUN RUPTL 2021-2030,
PEMERINTAH TINGKATKAN PORSI
PEMBANGKIT LISTRIK BERBASIS EBT

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

DISIPLIN TERAPKAN

5M:



Memakai masker



Mencuci tangan
pakai sabun



Menjaga jarak



Menjauhi kerumunan



Mengurangi mobilitas



INGAT!

Efikasi vaksin yang kita dapat 65%.

Vaksin belum jaminan terhindar dari Covid-19



gatrik.esdm.go.id

/



@infogatrik

/



Info Gatrik



Buletin Ketenagalistrikan

Edisi 66 Volume XVII

Juni 2021

TIM REDAKSI

Penanggung Jawab

Sekretaris Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan

Redaktur

Kepala Bagian Rencana dan Laporan
Kepala Sub Bagian Pengelolaan Informasi
Kepala Sub Bagian Penyiapan Rencana & Program
Pandu Satria Jati
Anggita Miftah Hairani
Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Laporan
Wisnu Pujiyanto
Fajar Rahmadhy
Khairiah Dewi
Syifaal Barir
Hagni Surendro

Penyunting/Editor

Utami Hikmaasih
Agnes Tania

Desain Grafis

Aslan Firdaus
Agus Surahman

Fotografer

Rahmad Cahyo Nugroho
Additya Fitroh Firmansyah
Virbyansah Achmadan N
Agah Muhammad Abduh
Ajat Munajat

Sekretariat

Ulung Sukmana
Zaenal
Beni Hendrawan

Alamat Redaksi

Redaksi Buletin Ketenagalistrikan
Jalan HR Rasuna Said Blok X2,
Kav.7-8, Kuningan
Jakarta Selatan 12950

www.gatrik.esdm.go.id

DARI REDAKSI

Pembaca Buletin Ketenagalistrikan,

Keselamatan ketenagalistrikan merupakan salah satu aspek yang penting. Peralatan listrik yang terpasang harus memenuhi persyaratan keselamatan ketenagalistrikan, salah satunya Standar Nasional Indonesia (SNI). Untuk menertibkan pemberlakuan SNI ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perdagangan, Badan Standardisasi Nasional (BSN), serta Lembaga Sertifikasi Produk (LSPPro) melakukan pemusnahan stop kontak tak ber-SNI, pada akhir Mei 2021 lalu. Selain pemberlakuan SNI dibidang ketenagalistrikan, Kementerian ESDM memiliki berbagai persyaratan teknis dalam instalasi penyediaan, penyaluran, dan pemanfaatan tenaga listrik guna memastikan keselamatan ketenagalistrikan.

Liputan terkait penertiban stopkontak ber-SNI tersebut menjadi Tajuk Utama dalam Buletin edisi kali ini. Dalam Liputan Khusus, redaksi mengangkat liputan mengenai pelaksanaan posko hari Raya Idulfitri yang dilaksanakan secara daring untuk memastikan keamanan pasokan listrik pada periode Idulfitri 1442 H/2021. Selain posko pelaporan, Tim Inspektur Ketenagalistrikan siap turun ke lapangan dalam rangka penanganan kejadian khusus pada sistem kelistrikan nasional.

Dalam Rubrik Warta kita, Redaksi Buletin Ketenagalistrikan menghadirkan beberapa kegiatan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Triwulan II 2021 seperti penyusunan RUPTL, penyusunan SOP pengelolaan FABA, serta berbagai kebijakan lain yang mendukung energi bersih di Indonesia. Perpanjangan stimulus ketenagalistrikan juga menjadi salah satu pemberitaan dalam Buletin edisi ini. Semoga tulisan-tulisan ini memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua.

Selamat membaca

Kirimkan tulisan Anda ke Buletin Ketenagalistrikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Syarat Teknis :

1. Font penulisan naskah menggunakan Arial
2. Ukuran font yang digunakan 12
3. Jarak spasi penulisan 1,5
4. Jumlah kata dalam satu naskah 600-1000 kata

Syarat Umum:

1. Judul naskah menggunakan kalimat yang menarik
2. Penulisan menggunakan bahasa yang umum (mudah dimengerti)
3. Tema naskah bisa tentang ketenagalistrikan, atau naskah umum misalnya: tentang manajemen, pengembangan diri, dll.
4. Naskah asli belum pernah dimuat di media lain
5. Naskah bisa ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris
6. Naskah dikirim melalui email ke infogatrik@esdm.go.id
7. Naskah dikirim beserta foto/ilustrasi yang sesuai sebanyak tiga buah foto dengan caption
8. Penulis menyertakan biodata beserta foto diri
9. Redaksi berhak memuat naskah dengan perubahan atau tidak memuat naskah yang dikirim dalam Buletin Ketenagalistrikan

DAFTAR ISI

3 Dari Redaksi

4 Daftar Isi

Tajuk Utama

6

Jamin Keselamatan Ketenagalistrikan,
Pemerintah Tertibkan Peralatan Listrik
Tidak Ber- SNI

Kementerian ESDM dan Kemendag Tertibkan
Stop Kontak Tak Sesuai SNI

8

Liputan Khusus

10

Pemerintah dan PLN Pantau Pasokan Listrik
Periode Idul fitri

11

H-7 Idulfitri, Pasokan Listrik
Dilaporkan Aman

12

Posko Idulfitri Subsektor Ketenagalistrikan
Ditutup, Kondisi Listrik Terpantau Aman

Warta Kita

16

Strategi Pemerintah dalam
Pengembangan Pembangkit Energi
Baru Terbarukan

18

Kunker Spesifik ke PLTGU Muara Tawar,
Ini Manfaat dari Pembangkit Tersebut

20

Belajar dari Kepemimpinan Prof. Purnomo
Yusgiantoro di Masa Transisi

22

Kementerian ESDM
Dukung Penggunaan Energi Bersih

24

Transisi Energi Bersih Melalui Kendaraan
Bermotor Listrik

26

Susun RUPTL 2021-2030,
Pemerintah Tingkatkan Porsi Pembangkit
Listrik Berbasis EBT

- 28** Komitmen Energi Bersih Indonesia untuk ASEAN
- 30** Halalbihalal Virtual, Dirjen Gatrik Beri Apresiasi pada Unit Kerja Berprestasi
- 32** Regulasi Aturan Jaringan Terbaru Optimalkan Potensi EBT
- 34** Menteri Arifin: Perlunya Ekosistem yang Masif untuk Beralih ke KBLBB
- 36** Sinergi pemulihan listrik NTT, Kementerian ESDM Terjunksan Inspektur Ketenagalistrikan
- 37** Pemerintah Dorong Modernisasi Sistem Tenaga Listrik Melalui Smart Grid
- 38** Kunjungan Kerja ke PLTU Tanjung Jati B, Pembangkit Harus Perhatikan Aspek Lingkungan
- 40** Kementerian ESDM Sambut Baik SPKLU Swasta Pertama di Indonesia
- 42** Jadi Peluang Bisnis, Kementerian ESDM Dorong Pengoperasian SPKLU
- 44** Stimulus Ketenagalistrikan Berlanjut, Pemerintah Pastikan Mekanisme Penyalurannya Siap
- 46** Ditjen Ketenagalistrikan Menyusun SOP Pengelolaan FABA
- 48** Pemerintah Dukung Pengembangan SDM Ketenagalistrikan Hadapi Industri 4.0
- 50** Upaya dukung pemerintah, Indocement berkomitmen turunkan Emisi Gas Rumah Kaca
- 52** Pemerintah Terbitkan Aturan Penyelenggaraan Perizinan Turunan UU Cipta Kerja

54

Kolom

Menakar Kesiapan Indonesia
Memasuki Era Kendaraan Listrik

58

Daftar Regulasi

Daftar Regulasi Koleksi Perpustakaan
Ditjen Ketenagalistrikan
Semester 1 Tahun 2021



Belasan kotak kardus berisi 4.800 stopkontak listrik tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dimusnahkan di Cikande (28/5/2021).

JAMIN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN, PEMERINTAH TERTIBKAN PERALATAN LISTRIK TIDAK BER-SNI

Belasan kotak kardus berisi 4.800 stopkontak listrik diseret keluar dengan troli oleh seorang karyawan salah satu pabrik di Cikande, Kabupaten Serang, untuk dimusnahkan. Di salah satu kardus, terdapat Berita Acara Penyaksian Bukti Penarikan Produk dari Peredaran Pasar. Berdasarkan uji laboratorium, stopkontak tersebut dinyatakan tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

Di bawah pengawasan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perdagangan, Badan Standardisasi Nasional (BSN), serta Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro), kotak kardus tersebut dibuka satu per satu. Lapangan di depan pabrik cukup luas untuk proses pemusnahan. Sudah tersedia meja panjang dan palu, juga tong besi dan beberapa ember minyak.



Sesuai instruksi, beberapa karyawan pabrik membuka kardus dan mencopot kemas stopkontak, sementara yang lain memalu stopkontak itu hingga pecah. Pecahan stopkontak kemudian ditaruh di tong besi, diberi minyak, kemudian dibakar. Proses ini berulang beberapa kali hingga stopkontak tak sesuai SNI itu musnah.

Tidak hanya di Cikande (28/5/2021), proses pemusnahan juga dilakukan kepada sebanyak 1.416 stopkontak di Cibinong (25/5/2021), dan 324 stopkontak di Cengkareng (27/5/2021). Total ada 6.540 stopkontak yang dimusnahkan pemerintah untuk melindungi konsumen dari sisi keamanan, kesehatan, keselamatan, lingkungan (K3L) juga melindungi industri dalam negeri. Stopkontak yang tidak lolos uji SNI ditarik peredarannya dari masyarakat untuk menjaga keselamatan ketenagalistrikan.

Efek Jera

Sinergi beberapa Kementerian/Lembaga dalam menertibkan peralatan listrik tidak ber-SNI ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada produsen yang tidak sesuai dengan ketentuan. Direktur Pengawasan Barang dan Jasa Kementerian Perdagangan Ivan Fithriyanto pada saat penertiban di Cibinong (25/5/2021) mengungkapkan bahwa pihaknya berkewajiban melakukan pengawasan di pasar secara berkala maupun khusus terhadap produk SNI tusuk kontak dan stopkontak yang telah diberlakukan secara wajib oleh Kementerian ESDM.

Dengan diselenggarakannya kegiatan pemusnahan barang ini, Ivan berharap dapat memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang tidak taat ketentuan dan memberikan contoh kepada pelaku usaha lain agar menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan.

Senada dengan Ivan, Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Wanhar mengungkapkan bahwa stopkontak yang tidak memenuhi syarat mutu SNI dapat menimbulkan bahaya kebakaran yang dapat menyebabkan kerugian materiil dan korban.

"Pemberian sanksi atas peralatan ketenagalistrikan yang tidak sesuai SNI dilakukan untuk memberikan efek jera dan agar tidak terulang di kemudian hari," ujar Wanhar, Rabu (30/6/2021).

Wanhar mengimbau masyarakat untuk ikut serta mengecek peralatan listrik yang dibeli dan memastikan sudah sesuai SNI. Pemberlakuan SNI untuk produk-produk ketenagalistrikan diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) di Bidang Ketenagalistrikan. Pemberlakuan wajib SNI di bidang ketenagalistrikan juga untuk memenuhi aspek keselamatan ketenagalistrikan sesuai Pasal 44 Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Keselamatan Ketenagalistrikan Diatur

Pemberlakuan SNI Ketenagalistrikan merupakan salah satu aspek dalam keselamatan ketenagalistrikan. Wanhar mengingatkan bahwa selain bermanfaat, listrik juga berbahaya, untuk itu diperlukan penanganan khusus agar semua terhindar dari bahaya. Selain pemberlakuan SNI di bidang ketenagalistrikan, Wanhar menyebut Kementerian ESDM memiliki berbagai persyaratan teknis dalam instalasi penyediaan, penyaluran, dan pemanfaatan tenaga listrik guna memastikan keselamatan ketenagalistrikan.

Seluruh instalasi listrik disebut Wanhar wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO). Seluruh tenaga teknik yang berurusan dengan sektor ketenagalistrikan wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK). Sedangkan setiap badan usaha penunjang tenaga listrik harus terdaftar di Kementerian ESDM.

Informasi terkait SLO dapat diakses di laman: <http://slodjk.esdm.go.id>, sedangkan untuk SKTTK masyarakat dapat mengakses <http://skttkdjk.esdm.go.id>. Badan usaha yang akan mengurus SBU Ketenagalistrikan dapat menghubungi laman <http://sbudjk.esdm.go.id> dengan keterangan lebih lanjut dapat disampaikan melalui surel infogatrik@esdm.go.id.





KEMENTERIAN ESDM DAN KEMENDAG TERTIBKAN STOP KONTAK TAK SESUAI SNI

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan bersama Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga melakukan penertiban 6.540 buah produk Kotak-Kontak yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) di Cibinong Kabupaten Bogor, Rabu (25/5).

Selain di Cibinong kegiatan pemusnahan kotak kontak juga akan dilaksanakan di Cengkareng Jakarta Barat, Kamis (27/5), dan Cikande Kabupaten Serang, Jumat (28/5). Kegiatan pemusnahan kotak kontak hasil uji petik Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang tidak sesuai standar SNI merupakan hasil koordinasi antara Kementerian ESDM, Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian Perdagangan, serta Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro). Pemusnahan barang ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari sisi keamanan, kesehatan, keselamatan, lingkungan (K3L) juga melindungi industri dalam negeri.

Seperti diketahui bahwa tusuk kontak/kotak kontak yang tidak memenuhi syarat mutu SNI dapat menimbulkan bahaya kebakaran yang dapat menyebabkan kerugian materiil dan korban jiwa.

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Wanhar berujar penertiban produk kotak kontak yang tidak sesuai SNI merupakan upaya pengawasan terhadap keselamatan ketenagalistrikan, khususnya dalam mencegah terjadinya kebakaran akibat hubungan pendek listrik. Ia mengapresiasi pemberian sanksi terhadap peralatan ketenagalistrikan yang tidak sesuai SNI untuk memberikan efek jera dan tidak terulang dikemudian hari. "Standardisasi ketenagalistrikan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan keselamatan ketenagalistrikan. Karena selain bermanfaat listrik juga berbahaya, jadi semua peralatan listrik harus sesuai standar," ujar Wanhar.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Veri Anggrijono mengatakan, "Pemusnahan kotak-kontak yang tidak sesuai SNI dilakukan sebagai upaya perlindungan konsumen. Terhadap produk yang telah beredar di pasar yang tidak memenuhi SNI, wajib ditarik dari peredaran untuk selanjutnya dilakukan pemusnahan."



Penertiban 6.540 buah produk Kotak-Kontak yang tidak sesuai vd nasional Indonesia (SNI) oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan bersama Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di Cibinong Kabupaten Bogor, Rabu (25/5).

“Standardisasi ketenagalistrikan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan keselamatan ketenagalistrikan. Karena selain bermanfaat listrik juga berbahaya, jadi semua peralatan listrik harus sesuai standar,”

W a n h a r

Veri Anggrijono meminta agar LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI Kotak Kontak/Tusuk Kontak yang tidak sesuai SNI ikut bertanggungjawab dalam peredaran produk ini dan meminta agar LSPro juga melakukan pengawasan terhadap produk yang telah disertifikasinya, sehingga dapat mengurangi produk yang tidak sesuai SNI yang beredar di Pasar. Selain itu, Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan unit Pembina dalam hal ini Kementerian ESDM melakukan pengawasan terhadap LSPro yang diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh unit Pembina.

“Berdasarkan pemantauan penerapan SNI yang dilakukan oleh BSN, dari 12 merek yang dilakukan uji petik sejumlah 8 merek atau 66% tidak sesuai SNI,” tambah Veri.

Sebagai tindak lanjut pemantauan penerapan SNI tersebut, LSPro sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap produk yang disertifikasinya, telah melakukan audit terhadap produsen/importir yang produknya gagal memenuhi konsistensi mutu SNI, di hasil audit menunjukkan bahwa produk tersebut memang benar tidak sesuai SNI. Apabila dari hasil audit/surveilen produk tidak sesuai dengan SNI, maka sertifikat produk yang dimiliki oleh Produsen/Importir dapat dibekukan untuk sementara dan dapat digunakan kembali apabila produk telah memenuhi persyaratan.

Direktur Pengawasan Barang dan Jasa Ivan Fithriyanto mengungkapkan, “Kementerian Perdagangan berkewajiban melakukan pengawasan baik secara berkala ataupun khusus

terhadap produk SNI Tusuk-Kontak dan Kotak-Kontak untuk keperluan rumah tangga yang beredar di pasar yang mana produk tersebut telah diberlakukan secara wajib oleh Kementerian ESDM.”

Dengan diselenggarakannya kegiatan pemusnahan barang ini, Ivan berharap dapat memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang tidak taat ketentuan dan memberikan contoh kepada pelaku usaha lain agar menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan.

Pengawasan yang rutin dilakukan khususnya terhadap produk-produk asal impor yang tidak memenuhi ketentuan diharapkan dapat menjamin terlaksananya perlindungan konsumen serta mendorong penggunaan produksi dalam negeri. (AT)

PEMERINTAH DAN PLN

PANTAU PASOKAN LISTRIK PERIODE IDULFITRI

Dalam rangka menjaga pasokan tenaga listrik tetap andal selama periode Idulfitri 1442 H, Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero) membentuk Posko Nasional Subsektor Ketenagalistrikan. Posko ini bertugas memantau dan melaporkan kondisi kelistrikan nasional periode Idulfitri 1442/2021. Selain itu, Inspektur Ketenagalistrikan siap turun ke lapangan dalam rangka penanganan kejadian khusus pada sistem kelistrikan nasional. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Munir Ahmad dalam Rapat Kesiapan Keandalan Pasokan Tenaga Listrik Hari Raya Idulfitri 1442 H Tahun 2021, Selasa (04/05/2021).

Munir mengatakan pihaknya menugaskan pegawai Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk berkoordinasi dengan seluruh perangkat PT PLN (Persero) di Indonesia guna mendapatkan data dan informasi kondisi pasokan tenaga listrik nasional. Posko Idulfitri sendiri diselenggarakan secara virtual pada H-7 hingga H+7, mulai Kamis (6.5.2021). Laporan kondisi kelistrikan ini akan dilaporkan setiap hari kepada Menteri ESDM.

"Ini merupakan tugas pemerintah dalam menjamin ketersediaan pasokan listrik," ucap Munir.

Munir juga mengatakan bahwa Ditjen Ketenagalistrikan melalui Inspektur Ketenagalistrikan siap mengantisipasi kejadian khusus selama periode Idulfitri, sehingga masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan aman dan nyaman. Apabila terdapat kejadian khusus, Inspektur Ketenagalistrikan siap turun ke lapangan dan berkoordinasi dengan PT PLN (Persero).

"Kami juga menugaskan beberapa Inspektur Ketenagalistrikan untuk dapat turut serta untuk turun ke lapangan dalam rangka penanganan kejadian khusus di sistem kelistrikan nasional," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Wanhar menuturkan bahwa kendala distribusi pasokan listrik ke daerah-daerah terpencil dan sulit diakses adalah karena faktor alam. Ia meminta PLN dapat mengantisipasi faktor alam tersebut sehingga pelaksanaan Idulfitri dapat berjalan dengan baik.

"Kondisi alam ini harus kita antisipasi sehingga nanti tidak hanya kita yang berada ditengah kota dengan sistem kelistrikan yang baik yang bisa menikmati hari raya. Teman-teman kita yang di daerah terpencil harus tetap kita perhatikan, sehingga semuanya berjalan lancar," jelas Wanhar.

Rapat Kesiapan Keandalan Pasokan Tenaga Listrik Hari Raya Idulfitri 1442 H/ Tahun 2021 ini merupakan koordinasi awal Ditjen Ketenagalistrikan dengan PT PLN (Persero) dalam memastikan pasokan tenaga listrik berjalan dengan baik selama periode Idulfitri. "Kami berharap pelaksanaan Posko Idulfitri 1442 H/ Tahun 2021 subsektor ketenagalistrikan nantinya dapat menjadi rangkaian kegiatan pemantauan yang lengkap dan bermanfaat bagi semua pihak," ujar Munir. (AT)



Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero) membentuk Posko Nasional Subsektor Ketenagalistrikan Dalam rangka menjaga pasokan tenaga listrik tetap andal selama periode Idulfitri 1442 H, 1442/2021.

H-7 IDULFITRI, PASOKAN LISTRIK DILAPORKAN AMAN



Pemerintah memastikan pasokan listrik pada H-7 Idulfitri 1442/2021 dipastikan aman, Kamis (6/5/2021).

Pemerintah memastikan pasokan listrik pada H-7 Idulfitri 1442/2021 atau Kamis (6/5/2021) dipastikan aman. Hal tersebut seperti yang dilaporkan Tim Posko Nasional Idulfitri Subsektor Ketenagalistrikan. Pada data tanggal 5 Mei 2021 periode beban puncak malam hari, keseluruhan sistem kelistrikan dilaporkan dalam kondisi Aman. Secara keseluruhan Daya Mampu Pasok Nasional sebesar 42.921,12 MW dan Beban Puncak sebesar 36.709,42 MW, sehingga Kapasitas Cadangan Daya Nasional sebesar 6.211,70 MW, atau sebesar 16,92%.

Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Munir Ahmad, Kamis (6/5/2021) di Jakarta menyampaikan bahwa dalam rangka menjaga pasokan tenaga listrik tetap andal selama periode Idulfitri 1442 H, Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero)

membentuk Posko Nasional Subsektor Ketenagalistrikan. Posko ini bertugas memantau dan melaporkan kondisi kelistrikan nasional kepada Menteri ESDM. Selain memantau kondisi kelistrikan nasional PT. PLN (Persero), Tim Posko juga memantau beberapa wilayah usaha penyediaan tenaga listrik di luar PT PLN (Persero).

Munir mengatakan, Posko Idulfitri subsektor ketenagalistrikan ini diselenggarakan secara virtual pada H-7 hingga H+7, mulai Kamis (6/5/2021) hingga Jumat (21/5/2021). Ia juga mengatakan bahwa Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM melalui Inspektur Ketenagalistrikan siap mengantisipasi kejadian khusus selama periode Idulfitri, sehingga masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan aman dan nyaman.

“Apabila terdapat kejadian khusus, Inspektur Ketenagalistrikan siap turun ke lapangan dan berkoordinasi dengan PT PLN (Persero),” ujarnya.

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Wanhar dalam Rapat Koordinasi Petugas Posko Idulfitri, Selasa (4/5/2021) meminta PLN dapat mengantisipasi faktor alam tersebut sehingga pelaksanaan Idulfitri dapat berjalan dengan baik.

“Kondisi alam ini harus kita antisipasi sehingga nanti tidak hanya kita yang berada ditengah kota dengan sistem kelistrikan yang baik yang bisa menikmati hari raya. Teman-teman kita yang di daerah terpencil harus tetap kita perhatikan, sehingga semuanya berjalan lancar,” ucap Wanhar. (PSJ)

POSKO IDULFITRI SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN DITUTUP, KONDISI LISTRIK TERPANTAU AMAN



Posko Pemantauan Kondisi Ketenagalistrikan Periode Idulfitri 1442 H resmi ditutup Jumat (21/5/2021).

Posko Pemantauan Kondisi Ketenagalistrikan Periode Idulfitri 1442 H resmi ditutup Jumat (21/5/2021). Secara umum kondisi pasokan listrik periode Idulfitri 1442 H/ 2021 M sejak dibentuknya Posko tanggal 6 Mei 2021 dilaporkan dalam kondisi pasokan listrik aman. Posko juga melaporkan beberapa kejadian khusus yang menyebabkan terjadinya pemadaman di sejumlah daerah, namun dapat diatasi dengan baik.

“Meskipun aman, masih terjadi beberapa pemadaman listrik secara lokal yang disebabkan karena cuaca banjir dan kebakaran, khususnya di Pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Munir Ahmad, Senin (24/5).



Kami mengapresiasi PLN yang telah memastikan kesiapan dan keandalan sistem kelistrikan, meliputi kesiapan unit pembangkit, penguatan jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik selama periode posko ini

Munir Ahmad

Munir mengatakan bahwa pada periode pemantauan Hari H Idulfitri, Kamis (13/5/2021) tercatat bahwa kondisi kelistrikan keseluruhan Daya Mampu Pasok Perusahaan PLN sebesar 43.647,49 MW dan Beban Puncak sebesar 31.004,77 MW, sehingga Kapasitas Cadangan Sistem sebesar 12.642,73 MW, atau sebesar 40,78 %. Sedangkan untuk kondisi kelistrikan Wilayah Usaha Perusahaan Non PLN pada tanggal 13 Mei 2021, dapat dilaporkan bahwa Daya Mampu Pasok sebesar 2.081,56 MW dan Beban Puncak sebesar 795,49 MW, sehingga Kapasitas Cadangan Sistem sebesar 1.286,07 MW, atau sebesar 161,67 %.

Pada periode pemantauan hari kedua Idulfitri, Jumat (14/5/2021) tercatat bahwa kondisi kelistrikan keseluruhan Daya Mampu Pasok Perusahaan PLN sebesar 44.262 MW dan Beban Puncak sebesar 28.752,40 MW, sehingga

Kapasitas Cadangan Sistem sebesar 15.509,60 MW, atau sebesar 53,94 %. Dan untuk kondisi kelistrikan Wilayah Usaha Perusahaan Non PLN pada tanggal 14 Mei 2021, dapat dilaporkan bahwa Daya Mampu Pasok sebesar 2.117,71 MW dan Beban Puncak sebesar 690,88 MW, sehingga Kapasitas Cadangan Sistem sebesar 1.426,83 MW, atau sebesar 206,52 %.

Posko Idulfitri melaporkan bahwa pada H-1 Idulfitri, yaitu Rabu (12/5/2021) sempat terjadi pemadaman di sebagian Cibitung, Tambun, dan Cikarang Jawa Barat karena kebakaran di Gardu Induk Cikarang. Namun sekitar 3 jam telah dilakukan normalisasi dan aliran listrik kembali seperti semula.

“Kami mengapresiasi PLN yang telah memastikan kesiapan dan keandalan sistem kelistrikan, meliputi kesiapan unit pembangkit, penguatan jaringan

transmisi dan distribusi tenaga listrik selama periode posko ini,” ucap Munir.

Ia juga mengapresiasi petugas PT PLN (Persero) yang telah siap siaga mengamankan pasokan tenaga listrik kepada masyarakat dan obyek vital lainnya. Sebagai contoh pada hari ketiga Idulfitri atau Sabtu (15/5/2021) terjadi banjir di Kabupaten Simalungun dan Gempa di Nias Barat Sumatera Utara yang mengakibatkan gangguan pada sistem kelistrikan setempat. Pada hari itu juga pemulihan terhadap jaringan sistem kelistrikan setempat telah selesai dilakukan dan sistem kembali normal.

Meskipun periode posko Idulfitri telah selesai, PLN tetap diharap dapat siaga mengamankan pasokan listrik agar aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan lancar. (AT/PSJ)



RUANG PELAYANAN PUBLIK PINDAH SEMENTARA

Sehubungan dengan renovasi Gedung Soemantri Brodjonegoro I, Pelayanan Publik Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sementara dilayani di:

**RUANG SISTEM INFORMASI LANTAI DASAR
GEDUNG SOEMANTRI BRODJONEGORO II**

**Telp: 021 5225180 ext 1123
Email: infogatrik@esdm.go.id**

Warta Kita

- 16** Strategi Pemerintah dalam Pengembangan Pembangkit Energi Baru Terbarukan
- 18** Kunker Spesifik ke PLTGU Muara Tawar, Ini Manfaat dari Pembangkit Tersebut
- 20** Belajar dari Kepemimpinan Prof. Purnomo Yusgiantoro di Masa Transisi
- 22** Kementerian ESDM Dukung Penggunaan Energi Bersih
- 24** Transisi Energi Bersih Melalui Kendaraan Bermotor Listrik
- 26** Susun RUPTL 2021-2030, Pemerintah Tingkatkan Porsi Pembangkit Listrik Berbasis EBT
- 28** Komitmen Energi Bersih Indonesia untuk ASEAN
- 30** Halalbihalal Virtual, Dirjen Gatrik Beri Apresiasi pada Unit Kerja Berprestasi
- 32** Regulasi Aturan Jaringan Terbaru Optimalkan Potensi EBT
- 34** Menteri Arifin: Perlunya Ekosistem yang Masif untuk Beralih ke KBLBB
- 36** Sinergi pemulihan listrik NTT, Kementerian ESDM Terjankan Inspektur Ketenagalistrikan
- 37** Pemerintah Dorong Modernisasi Sistem Tenaga Listrik Melalui Smart Grid
- 38** Kunjungan Kerja ke PLTU Tanjung Jati B, Pembangkit Harus Perhatikan Aspek
- 40** LingkunganKementerian ESDM Sambut Baik SPKLU Swasta Pertama di Indonesia
- 42** Jadi Peluang Bisnis, Kementerian ESDM Dorong Pengoperasian SPKLU
- 44** Stimulus Ketenagalistrikan Berlanjut, Pemerintah Pastikan Mekanisme Penyalurannya Siap
- 46** Ditjen Ketenagalistrikan Menyusun SOP Pengelolaan FABA
- 48** Stimulus Keringanan Tagihan Listrik Bantu Pelanggan PT PLN (Persero)
- 50** Upaya dukung pemerintah, Indocement berkomitmen turunkan Emisi Gas Rumah Kaca
- 52** Pemerintah Terbitkan Aturan Penyelenggaraan Perizinan Turunan UU Cipta Kerja

STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN PEMBANGKIT ENERGI BARU TERBARUKAN



Pemerintah terus mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi pembangkit listrik. Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari menjelaskan strategi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam mewujudkan pengembangan EBT di sektor pembangkitan. Ida menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembedah buku dalam Webinar Bedah Buku *"Economics of Electricity: Markets, Competition, and Rules"*, Kamis (24/6/2021).



Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari menjadi pembedah buku dalam Webinar Bedah Buku "Economics of Electricity: Markets, Competition, and Rules", Kamis (24/6/2021).

Setidaknya ada delapan strategi yang dilakukan Pemerintah, antara lain pengembangan smart grid, revisi grid code, pengembangan PLTS Atap, dan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden mengenai EBT. Di samping itu, menurut Ida, Pemerintah mendorong cofiring PLTU dengan biomassa, serta dedieselisasi atau konversi pembangkit listrik diesel ke pembangkit listrik yang lebih ramah lingkungan.

"Pemerintah juga mendorong program *renewable energy-based economic development* (REBED) yaitu program penggunaan EBT untuk memacu perekonomian wilayah termasuk di daerah 3T, misal melalui pengembangan *microgrid*. Selain itu, Pemerintah mendorong program *renewable energy-based industry development* (REBID) yaitu melalui pengembangan potensi pembangkit listrik tenaga air dan panas bumi skala besar yang terintegrasi dengan pengembangan industri," Ida menjelaskan.

Sejalan dengan upaya Kementerian

ESDM dalam mendorong pengembangan EBT, Ida menyampaikan PT PLN (Persero) juga telah menyusun draft Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2021-2030 yang lebih 'hijau'. Porsi EBT dalam draft RUPTL tersebut meningkat menjadi 48%. Angka ini meningkat dibanding RUPTL 2019-2028 yang masih di kisaran 30%.

"Kami berharap sektor ketenagalistrikan semakin hari semakin andal dan semakin bersih, bagaimana kita bisa meningkatkan kontribusi EBT khususnya di sektor pembangkit listrik agar semakin kompetitif dan terjangkau untuk masyarakat," ujar Ida.

Webinar Bedah Buku diselenggarakan oleh Perpustakaan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Ditjen Gatrik) berkolaborasi dengan Agen Perubahan Ditjen Gatrik. Selain Ida, webinar ini juga menampilkan Pakar Ketenagalistrikan Institut Teknologi Bandung (ITB) Nanang Hariyanto sebagai pembedah buku. Senada dengan Ida, Nanang

menyampaikan pentingnya pengembangan EBT dalam pembangkitan listrik.

"Saat ini kita melakukan perencanaan-perencanaan. Salah satu hal yang harus kita lakukan dalam perencanaan adalah kita tidak boleh melupakan anak-cucu kita yang juga harus ikut menikmati energi ini. Jadi kalau sekarang kita ambil cadangan-cadangan batu bara, berarti kita ambil tabungan. Jadi itu harus dikurangi besar-besaran sehingga kita bisa memanfaatkan EBT. Mari kita mulai sama-sama berjalan ke arah sana," ujar Nanang.

Buku *Economics of Electricity: Markets, Competition, and Rules* ditulis oleh Anna Creti dan Fulvio Fontini. Nanang menyebut isu penting seperti digitalisasi dan dekarbonisasi diceritakan dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti. Ia mengatakan buku tersebut komperhensif dan update terhadap perkembangan sektor ketenagalistrikan yang ada saat ini. (AMH)

KUNKER SPESIFIK KE PLTGU MUARA TAWAR, INI MANFAAT DARI PEMBANGKIT TERSEBUT

Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Muara Tawar disebut cocok sebagai pembangkit peaker dan dapat menanggulangi dampak intermitten dari pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT). Untuk itu PLTGU berkapasitas 2.050 MW dan terhubung ke sistem 500 kV interkoneksi Jawa-Bali ini dapat juga berfungsi sebagai stabilisator tegangan dan fast response untuk pemulihan *Black Out*. Hal tersebut disampaikan Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu saat mendampingi kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTGU) Muara Tawar di Bekasi, Kamis (17/06/2021).



Kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTGU) Muara Tawar di Bekasi, Kamis (17/06/2021).

Kunjungan kerja ini dihadiri pula Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE Hendra Iswahyudi, Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura, dan Bali Haryanto WS, Direktur Utama PT PJB, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Rombongan Komisi VII DPR RI yang diwakili oleh Wakil Ketua Alex Noerdin menyampaikan bahwa tujuan kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI adalah mengetahui dan meninjau langsung PLTGU Muara Tawar, serta sebagai pelaksanaan pengawasan DPR RI.

Komisi VII meninjau secara langsung operasional PLTGU Muara Tawar dan melihat lebih dekat jaminan pasokan gas dari PGN ke PLTGU Muara Tawar. Dalam kunjungan ini, Komisi VII menemukan kendala operasional, yang diakibatkan pembangunan pulau reklamasi di Bekasi. Alex menegaskan agar operasional PLTGU Muara Tawar jangan sampai terganggu.

“Kami akan memanggil Pemda Bekasi ke DPR RI agar bisa mendiskusikan dan mencari solusi bersama antara Komisi VII dan pemangku kepentingan,” ujar Alex. Komisi VII juga menjaring aspirasi mitra terkait dan mendorong adanya sinergi diantara mitra-mitra tersebut untuk melaksanakan peran dan fungsinya dalam memaksimalkan potensi PLTGU Muara Tawar ini.

Dimana, PLTGU Jawa I Muara Tawar yang berlokasi di Kabupaten Bekasi ini merupakan salah satu bagian dari proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW yang dicanangkan oleh pemerintah.

Seperti diketahui, Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) yang berada di Muara Tawar, Bekasi, merupakan pembangkit listrik di Jawa bagian Barat yang menjadi *anchor buyer* PGN. Pembangkit Muara Tawar berkontribusi sekitar 24% terhadap total penyerapan gas sektor kelistrikan. Pembangkit listrik Muara Tawar memiliki karakteristik pola operasi khusus, yaitu sebagai *peaker* yang dapat menyerap kebutuhan gas pada saat beban puncak bisa mencapai lebih dari 200 BBTUD.

PT Perusahaan Gas Negara, Tbk. (PGN) sendiri berkomitmen mendukung PLN dalam menyediakan listrik handal dengan membangun infrastruktur dan pasokan gas bumi ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Muara Tawar. PGN juga berkomitmen menyediakan pemanfaatan terminal LNG dan penyaluran gas hasil regasifikasi LNG di Lampung yang terkoneksi dengan pipa transmisi South Sumatera - West Java (SSWJ). Hal ini, guna menjaga ketersediaan pasokan listrik di Pembangkit Listrik Muara Tawar, Bekasi.

PLTGU Muara Tawar memiliki kapasitas terpasang yang mencapai 2050 megawatt (MW), dan merupakan pemasok listrik saat beban puncak atau *peaker* ke dalam sistem kelistrikan Jawa-Bali. Diketahui pasokan gas PLTGU Muara Tawar saat ini berasal dari PT PGN (Persero) dengan penyerapan lebih dari 200 BBTUD (*Billion British Thermal Unit Per Day*).

Dalam kesempatan tersebut, Jisman juga menyampaikan update mengenai Keputusan Menteri ESDM Nomor 13K/13/MEM/2020 tentang Penugasan Pelaksanaan Penyediaan Pasokan dan Pembangunan Infrastruktur *Liquefied Natural Gas* (LNG), Serta Konversi Penggunaan Bahan Bakar Minyak dengan *Liquefied Natural Gas* (LNG) Dalam Penyediaan Tenaga Listrik. Ia menyampaikan bahwa progres terbagi menjadi 2 tahapan yaitu *quick win* di 3 lokasi dan sudah beroperasi (Sorong, Nias dan Tanjung Selo). Tahap 1 di 32 lokasi (25 sudah operasi, 7 dalam proses konstruksi) dan tahap 2 di 20 lokasi (9 dalam proses pengadaan, 11 dalam proses perencanaan. (AT)





Menteri ESDM Periode 2000-2009 Prof. Purnomo Yusgiantoro.

BELAJAR DARI KEPEMIMPINAN PROF. PURNOMO YUSGANTORO DI MASA TRANSISI

Kepemimpinan Menteri ESDM Periode 2000-2009 Prof. Purnomo Yusgiantoro yang dituangkan dalam sebuah buku diapresiasi sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk dibaca dan diteladani. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dapat mengambil pelajaran dari berbagai pengalaman Prof. Purnomo Yusgiantoro selama memimpin Kementerian ESDM di masa transisi untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang tepat di masa yang akan datang.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana saat menjadi pembedah buku "Rekam Jejak Dua Periode ESDM: Mengukir Masa Transisi 2000-2009" yang diselenggarakan secara daring oleh Purnomo Yusgiantoro Center, Kamis (16/6/2021).

Rida mengatakan keberadaan buku ini menunjukkan bahwa Prof. Purnomo Yusgiantoro merupakan seorang *good leader* dan mau berbagi pengalaman yang bermanfaat bagi banyak orang. Rekam jejak yang ditulis dalam buku ini disebut Rida sebagai suatu sejarah yang tak terbantahkan.

"Saya mengapresiasi terbitnya buku ini. Buku ini wajib dibaca dan isinya bagus," ujar Rida.

Kepemimpinan Prof. Purnomo Yusgiantoro selama sembilan tahun memimpin Kementerian ESDM disebutkan Rida mengajarkan untuk berpikir *out of the box* dan berani melawan arus, sepanjang menyelamatkan NKRI.

"Termasuk salah satunya membentuk undang-undang ketenagalistrikan yang dibentuk di masa transisi," ujarnya. Rida juga mengatakan bahwa melalui buku ini, ia belajar mengenai pentingnya *team work* dan saling percaya. Ia mengapresiasi Prof Purnomo yang tidak segan bertanya ke bawah selama menjabat sebagai Menteri ESDM di tiga presiden.

Dalam kesempatan tersebut Rida juga menjabarkan berbagai tantangan dan upaya sektor ketenagalistrikan setelah masa transisi dibawah kepemimpinan Prof. Purnomo Yusgiantoro.

Salah satu tantangan yang ia sampaikan dalam acara bedah buku tersebut adalah masih dihadapkannya kesenjangan antara Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Padahal menurutnya listrik adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan keadilan melalui rasio elektrifikasi dan pemerataan konsumsi perkapita. Selain itu tantangan di sektor ketenagalistrikan adalah subsidi yang



belum tepat sasaran. Ia mengatakan pemerintah ke depan akan mengubah mekanisme pemberian subsidi listrik.

"Pemerintah tidak dalam posisi mengurangi subsidi, tapi menjadikannya lebih tepat sasaran," ucapnya.

Rida mengatakan, dunia ke depan menuntut kita untuk menggunakan energi listrik yang lebih bersih, memiliki keberlanjutan, dan terjangkau. Buku ini disebutnya menjadi referensi dalam mengambil pelajaran akan keberhasilan dan tidak mengulangi kegagalan yang terjadi dalam menetapkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Acara bedah buku ini dalam rangka memperingati ulang tahun kelima Purnomo Yusgiantoro Center dan ulang tahun Prof. Purnomo Yusgiantoro. Hadir dalam acara ini Menteri Perdagangan Republik Indonesia Muhammad Lutfi, Sekjen Kementerian ESDM Ego Syahril, Dirjen Migas Periode 2008-2021 Evita H Legowo, Dirjen Minerba periode 2004-2008 Simon F Sembiring, dan Dirjen EBTKE Dadan Kusdiana.

Bedah buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran seluk beluk dan perjalanan sektor ESDM pada masa transisi di awal orde reformasi. Buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi energi untuk mempelajari isu strategis nasional dan menjadi referensi rekam perjalanan Kementerian ESDM selama dua periode. (PSJ)

KEMENTERIAN ESDM DUKUNG PENGGUNAAN ENERGI BERSIH



Dirjen Ketenagalistrikan Rida Mulyana sebagai ASEAN Senior Official on Energy (SOE) Leader Indonesia menghadiri the 39th The Senior Officials Meeting on Energy (SOME) and its Associated Meetings, tanggal 14-17 Juni 2021.

Untuk mendukung transisi energi kearah yang lebih bersih, pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM berinisiatif untuk membentuk ASEAN Center of Excellence on Coal and Clean Coal Technology (CoE) yang akan berkantor di Puslitbang TekMira, Bandung. Program tersebut telah disepakati bersama oleh seluruh negara ASEAN dengan didahului dengan pilot project plants di Palimanan, Cirebon.

Hal tersebut dirumuskan pada pertemuan Virtual the 39th The Senior Officials Meeting on Energy (SOME) and its Associated Meetings. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana sebagai ASEAN Senior Official on Energy (SOE) Leader Indonesia menghadiri acara tersebut yang berlangsung tanggal pada 14-17 Juni 2021.

Pertemuan tersebut membahas beberapa hal capaian hingga tahun 2020 dan juga rencana kerjasama energi ASEAN tahun 2021, diantaranya:

- a. Hingga tahun 2018, ASEAN telah mencapai 13,9% bauran energi terbarukan dari total energi primer (dari target 23% tahun 2025), dan capaian 26,8% total kapasitas terpasang pembangkit energi terbarukan (dari target 35% tahun 2025). Untuk itu pemanfaatan energi terbarukan dalam kebijakan energi ASEAN perlu terus ditingkatkan;
- b. Target Efisiensi Energi dan Konservasi telah ditingkatkan secara signifikan dari capaian 21% tahun 2018 menjadi 32% pada tahun 2025, untuk itu diperlukan inovasi dan kerjasama ASEAN dengan mitra wicara sebagai upaya bersama;



- c. Inisiatif Indonesia untuk membentuk *ASEAN Center of Excellence on Coal and Clean Coal Technology (CoE)* yang akan berkantor di Puslitbang TekMira, Bandung dengan *pilot project plants* di Palimanan, Cirebon telah disepakati bersama oleh seluruh negara ASEAN;
- d. Indonesia sebagai Ketua *ASEAN Energy Regulators' Network (AERN)* periode 2020-2021 sedang mendorong perluasan *Multilateral Power Trade (MPT)* di ASEAN. Volume perdagangan listrik *multilateral MPT* di ASEAN telah mencapai 24,97 GWh;
- e. Dalam kerjasama *Trans-ASEAN Gas Pipeline (TAGP)*, total interkoneksi *gas pipeline* adalah 3.673 km dan 8 *Regasification Terminal/RGTs* dengan kapasitas total 37,5 MTPA (status per September 2019). Di Indonesia, proyek Java FSRU dengan kargo LNG pertama pada bulan April 2021 akan komersial dalam waktu dekat.

Dalam kerangka *ASEAN Power Grid (APG)*, Indonesia tengah mendorong percepatan potensi interkoneksi antara Indonesia-Malaysia (Sumatera-Malaka, dan Kalimantan Utara-Sabah) dan juga program menjajaki kesempatan interkoneksi Sumatera-Singapura.

Kedepan akan diselenggarakan pertemuan *Special AMEM-METI Japan Consultation* pada tanggal 21 Juni 2021. *ASEAN SOE Leaders* sebelumnya telah bertemu dengan *SOE Leader* Jepang pada pertemuan *SOME-METI ke-22* tanggal 16 Juni 2021 untuk membahas *draft Joint Ministerial Statement AMEM-METI*, yang isinya memuat tentang inisiatif Jepang kepada ASEAN terkait transisi energi termasuk dukungan

pembiayaan. Sebagai tindak lanjut pertemuan *SOME-38*, nantinya akan diselenggarakan pertemuan virtual tingkat Menteri Energi ASEAN, yaitu the *39th ASEAN Minister on Energy Meeting (AMEM) and its Associated Meetings* yang akan berlangsung secara virtual pada bulan September 2021.

Pertemuan ini dibuka dan dipimpin oleh Pengiran Jamra Weira bin Pengiran Haji Petra, *Senior Official on Energy (SOE) Leader* Brunei Darussalam didampingi oleh Victor Jona SOE *Leader* Kamboja sebagai Vice Chairman.

Pertemuan dihadiri oleh perwakilan seluruh negara anggota ASEAN beserta koordinator *focal point Sub-Sector Network (SSN)* terkait, *ASEAN Secretariat (ASEC)*, *ASEAN Centre for Energy (ACE)*; dan *ASEAN Council on Petroleum (ASCOPE)*, *Heads of ASEAN Power Utilities/Authorities (HAPUA)* sebagai forum badan usaha kerja sama energi ASEAN dengan mitra wicara dan organisasi internasional. Perwakilan Indonesia hadir sebagai Virtual Observer terdiri dari perwakilan unit-unit utama KESDM, Setjen Dewan Energi Nasional (DEN), PT. PLN (Persero), PT. Pertamina (Persero), dan Kemenlu.

Dalam pertemuan tersebut, para Menteri Energi ASEAN akan mendeklarasikan *the Joint Declaration of the ASEAN Energy Ministers on Energy Transitions and Energy Security*. Deklarasi tersebut memuat komitmen bersama para Menteri Energi ASEAN untuk memperkuat kerjasama energi sebagai respon atas kedaruratan dan pemulihan ekonomi di masa pandemi, melalui kebijakan dan program yang nyata di tingkat nasional, bilateral dan multilateral untuk ketahanan energi di ASEAN. (RB/UH)

TRANSISI ENERGI BERSIH MELALUI KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK

Pemerintah terus mendorong upaya efisiensi dan konservasi energi nasional dalam mendukung transisi energi menuju pemanfaatan energi bersih berkelanjutan. Salah satu upaya yang juga dapat dilakukan menuju transisi energi bersih adalah mendorong terbentuknya ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). Dengan kondisi penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan saat ini, kapasitas dan distribusi pasokan listrik nasional telah dinyatakan siap untuk mendukung penggunaan mobil listrik, bahkan di beberapa daerah cadangan tenaga listrik siap menampung lonjakan daya tambahan.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari dalam salah satu seminar *The 3rd Indonesia Energy Efficiency and Conservation Conference & Exhibition (IEECCE)* yang diselenggarakan secara daring oleh Masyarakat Konservasi dan Efisiensi Energi Indonesia (MASKEEI), Rabu (16/06/2021).

“Peran Kementerian ESDM adalah penyediaan infrastruktur charging station guna mendukung percepatan pemanfaatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) atau *Battery Electric Vehicle (BEV)*,” ujar Ida mewakili Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.

Menurut Ida, dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, pemerintah bersama dengan *stakeholder* penyedia tenaga listrik terus berkomitmen untuk menjaga kecukupan pasokan energi listrik untuk masyarakat. Keseimbangan *supply dan demand* serta memastikan *reserve margin* dalam jumlah yang cukup merupakan hal yang penting yang terus diperhatikan pemerintah bersama dengan PT. PLN (Persero) agar bisnis ketenagalistrikan tetap berjalan secara sehat dengan nilai keekonomiannya. Ida mengatakan, salah satu komitmen ada tanggal 17 Desember 2020, telah dilakukan public launching Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) atau *Battery Electric Vehicle (BEV)*.

“Kegiatan ini menunjukkan bahwa Indonesia terus bergerak menuju kendaraan listrik berbasis baterai,” ujarnya.



Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari dalam salah satu seminar *The 3rd Indonesia Energy Efficiency and Conservation Conference & Exhibition (IEECCE)*, Rabu (16/06/2021).

Public launching tersebut menurut Ida bertujuan mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Menteri ESDM Arifin Tasrif disebutkan berkomitmen untuk meningkatkan Ketahanan Energi Nasional dengan mengurangi ketergantungan impor BBM, yang akan berdampak positif dalam pengurangan tekanan pada Neraca Pembayaran Indonesia akibat impor BBM.



"Peran Kementerian ESDM adalah penyediaan infrastruktur charging station guna mendukung percepatan pemanfaatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) atau Battery Electric Vehicle (BEV),"

Ida Nuryatin Finahari

Dukungan Regulasi

Kementerian ESDM sendiri telah menerbitkan Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk KBLBB sebagai upaya mendorong ekosistem KBLBB. Tarif listrik KBL di Indonesia ditetapkan sama untuk normal charging, fast charging, ataupun ultrafast charging sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2020.

Saat ini, Kementerian ESDM telah menyusun *Grand Strategi Energi Nasional (GSEN)*, dengan salah satu programnya adalah penggunaan KBLBB. Sesuai dengan arahan Presiden RI, program ini dapat mendukung Indonesia menuju arah *green economy*, dimana negara maju sudah menuju ke arah sana dan mengurangi risiko kerusakan-kerusakan lingkungan. Peta jalan menuju kendaraan bermotor listrik juga didukung dengan rencana pembangunan SPKLU dan SPBKLU di seluruh Indonesia.

Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2020 juga menyebutkan bahwa untuk pertama kali, penyediaan infrastruktur

pengisian listrik untuk KBLBB dilaksanakan melalui penugasan kepada PT PLN (Persero), yang mana dalam pelaksanaan tugas tersebut, PT PLN (Persero) dapat bekerja sama dengan BUMN dan / atau Badan Usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, PT PLN (Persero) juga mempunyai proyeksi sebagai peta jalan pengembangan SPKLU dan SPBKLU sampai dengan tahun 2030 sebagai wujud komitmen dalam pengembangan KBLBB. Hingga akhir Mei 2021, telah dibangun 147 unit charging stations untuk KBLBB yang tersebar di 119 lokasi yang tersebar di beberapa provinsi.

Kementerian ESDM telah mewujudkan beberapa dukungan terkait percepatan pengembangan KBLBB di Indonesia dan beberapa dukungan lainnya masih dalam tahap sedang dilaksanakan, seperti uji coba pekerjaan konversi kendaraan berbahan bakar BBM. Dukungan Kementerian ESDM tersebut diantaranya adalah konsisten melaksanakan *Public Launching* untuk mengajak masyarakat/*stakeholder* menggunakan KBLBB, secara aktif melakukan uji coba pekerjaan konversi K-BBM R2 menjadi KBLBB R2 dan

merencanakan dilanjutkan konversi kendaraan operasional Kementerian ESDM secara bertahap, menyiapkan website khusus KBLBB untuk merekam komitmen *stakeholder*, memberikan dukungan berupa pelatihan konversi K-BBM R2 menjadi KBLBB R2 kepada bengkel lokal, dan memasukkan program KBLBB sebagai salah satu program strategis di *Grand Strategi Energi Nasional (GSEN)*.

Saat ini konsumsi BBM Indonesia sekitar 1,2 juta barel *oil per day* (BOPD) dimana kebutuhan BBM tersebut sebagian besar dipasok dari impor. Semakin tumbuhnya pemanfaatan *electric vehicle* dan menurunnya penggunaan transportasi berbahan bakar BBM di Indonesia diharapkan potensi untuk mengurangi konsumsi BBM di tahun 2030 sebesar 6,03 juta kL dapat tercapai.

"Oleh karena itu diperlukan penggunaan sumber energi lokal terutama energi baru terbarukan dan gas, sehingga dapat meningkatkan kualitas udara dan mendukung pencapaian target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca nasional," tutup Ida. (UH)



Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menggelar konferensi pers yang dilakukan secara daring, Jumat (4/6/2021).

SUSUN RUPTL 2021-2030, PEMERINTAH TINGKATKAN PORSI PEMBANGKIT LISTRIK BERBASIS EBT

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meningkatkan porsi pembangkit listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi 48 persen atau 19.899 MW. Hal ini dituangkan dalam draft Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Perusahaan Listrik Negara (PLN) tahun 2021-2030. Angka ini meningkat dibanding RUPTL 2019-2028 yang masih di kisaran 30%. Dalam kurung waktu sepuluh tahun ke depan, target penambahan pembangkit mencapai 40.967 megawatt (MW) atau 41 gigawatt (GW).

“Kami ingin RUPTL yang sedang disusun saat ini adalah RUPTL yang lebih *green*, lebih hijau. Dalam artian, porsi EBT lebih baik daripada versi RUPTL sebelumnya. Perbandingannya, RUPTL yang ada saat ini (2019-2028) hanya merencanakan 30% EBT. Sementara yang kita susun saat ini minimum 48%,” ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana, Jumat (4/6/2021), dalam konferensi pers yang dilakukan secara daring.

Penyusunan RUPTL ini sejalan dengan target bauran EBT sebesar 23% di tahun 2025. Rida juga mengungkapkan berbagai kebijakan “hijau” yang terdapat dalam RUPTL 2021-2030 yang saat ini masih dalam pembahasan. Kebijakan tersebut antara lain konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) ke pembangkit EBT, *co-firing* Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara, retirement pembangkit tua, dan relokasi pembangkit ke sistem yang memerlukan.

“Bukan memusuhi batubara, tapi kita ingin yang terbaik untuk negara ini seperti apa. RUPTL menjadi komitmen Indonesia terhadap dunia agar kita ikut berkontribusi memerangi dampak dari perubahan iklim,” Rida menyampaikan. Sejalan dengan pembahasan RUPTL “hijau” ini, Ditjen Ketenagalistrikan juga tengah merancang *template Net Zero Emission* (NZE), sebagai perwujudan realisasi komitmen Presiden Joko Widodo pada Konferensi Perubahan Iklim COP21 tahun 2015. NZE adalah kondisi di mana Gas Rumah Kaca yang diemisikan/dilepas ke atmosfer seluruhnya diserap, baik secara alami maupun dengan intervensi teknologi.

“Kita sedang menyusun program, termasuk regulasinya, bagaimana mengurangi porsi pembangkit (fosil) secara natural. Namun yang menjadi penting juga, bagaimana kita memenuhi *demand* yang diyakini akan naik serta di sisi lain mengurangi operasional pembangkit batubara dan kemudian menggantikannya. Kita sedang merancang *template* NZE seperti apa, minimum dari pembangkitan,” jelas Rida.

Sebagaimana diketahui, saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sedang menyusun dokumen *Long-term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience* 2050 di mana di dalamnya terdapat visi mengenai rencana NZE. Untuk mendukung hal tersebut, Ditjen Ketenagalistrikan sedang menyusun perencanaan NZE yang berasal dari subsektor ketenagalistrikan.

Peningkatan Rasio Elektrifikasi

Selain mendorong pemanfaatan EBT, Pemerintah juga memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan listrik secara merata. Kementerian ESDM menargetkan Rasio Elektrifikasi 100% pada tahun 2022.

“Kita sudah rancang, hal tersebut tercantum dalam draft RUPTL 2021-2030, bahwa di tahun 2022 kita upayakan Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik bisa 100%,” kata Rida.

Hingga Maret 2021, rasio elektrifikasi mencapai 99,28% dan rasio desa berlistrik 99,59%. Hal tersebut berarti masih ada 0,72% rumah tangga dan 0,41% desa di seluruh Indonesia yang belum berlistrik.

“Yang menjadi perhatian kita adalah yang belum berlistrik. Itu yang kemudian kita kejar, baik untuk rasio elektrifikasi maupun rasio desa berlistrik. Kita pastikan agar akses energi bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia di manapun berdomisili,” tegas Rida.

Rida mengakui, kemajuan upaya melistriki seluruh Indonesia saat ini mengalami perlambatan. Dari akhir tahun 2020 hingga Mei 2021, kenaikan rasio elektrifikasi hanya 0,08%. Hal tersebut, ulasnya, karena domisili masyarakat yang belum menikmati listrik berada di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), yang memiliki tantangan dari kondisi geografi dan demografinya. (DKD/AMH)



KOMITMEN ENERGI BERSIH INDONESIA UNTUK ASEAN

Sektor energi saat ini bertransformasi menuju energi yang lebih hijau dan lebih bersih. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025. Upaya untuk membantu mengurangi efek perubahan iklim dan menurunkan emisi CO2 secara signifikan ini diharapkan dapat bersama-sama dilakukan untuk seluruh kawasan ASEAN.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana dalam acara *Special Asean Energy Regulators Network (AERN) Meeting* yang diselenggarakan secara virtual, Kamis (20/05/2021).





Special Asean Energy Regulators Network (AERN) Meeting yang diselenggarakan secara virtual, Kamis (20/05/2021).

AERN Meeting merupakan pertemuan rutin yang dilaksanakan sebagai sarana bertukar pikiran dan informasi terkait perkembangan sektor energi diantara regulator energi negara-negara ASEAN. Saat ini Indonesia menjadi ketua AERN untuk periode 2020-2021 yang diketuai oleh Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu.

AERN Meeting kali ini membahas semua pandangan Anggota AERN tentang peran AERN dalam pengembangan *Multinational Power Trade* (MPT) di ASEAN, baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Hal ini sejalan dengan salah satu prioritas energi tahunan dan Rencana Aksi APAEC Tahap II 2021-2025.

Jisman Hutajulu menyampaikan bahwa pada pertemuan SOME dan AMEM ke-38 secara virtual tahun lalu di Vietnam, Menteri ESDM Arifin Tasrif mencatat beberapa rekomendasi terkait peran AERN sebagai platform regulator negara-negara ASEAN untuk berkolaborasi dan mengembangkan MPT dan *ASEAN Power Grid*.

“AERN menginginkan adanya kolaborasi berkelanjutan antar Anggota AERN serta dialog antar mitra akan berkelanjutan di tahun-tahun mendatang untuk memenuhi target *AERN Capacity Building Plans*,” ungkap Jisman.

Melalui kerjasama beberapa sektor energi di ASEAN, Jisman berharap dapat meningkatkan ketahanan energi di ASEAN, mendorong pengembangan energi terbarukan, memperluas MPT, serta meningkatkan kapasitas ASEAN Energy Regulator.

“Kami berharap melalui komitmen dan kolaborasi kita dalam sektor energi, ASEAN dapat menjadi bagian dari upaya global dalam mencapai *zero emission*. Semua upaya ini dapat dilakukan dengan baik melalui AERN sebagai platform bersama antara regulator energi di ASEAN dalam berkolaborasi dan mengembangkan konsensus regulasi pengembangan MPT dan Jaringan Listrik ASEAN,” tutup Rida. (u)

HALALBIHALAL VIRTUAL, DIRJEN GATRIK BERI APRESIASI PADA UNIT KERJA BERPRESTASI

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Ditjen Gatrik) melaksanakan halalbihalal virtual pada hari pertama masuk kantor setelah libur Lebaran, Senin (17/5/2021). Dirjen Gatrik Rida Mulyana menyampaikan acara ini dilakukan untuk mempererat tali silaturahmi meskipun di tengah pandemi. Acara ini dihadiri oleh semua pejabat eselon II, koordinator, subkoordinator, dan pegawai Ditjen Gatrik, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN.



Halalbihalal virtual Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Ditjen Gatrik) pada hari pertama masuk kantor setelah libur Lebaran, Senin (17/5/2021).

"Walau dilakukan secara virtual, semoga acara ini tidak kehilangan esensi, kekhidmatan, dan semangat kenapa kita melakukan ini. Dalam suasana Idulfitri, saya selaku pimpinan dan pribadi mengucapkan selamat Hari Raya Idulfitri 1442 H. Mohon maaf lahir batin yang setulus-tulusnya," ujar Rida.

Ia menyebut momen halalbihalal ini sebagai penyemangat setelah libur Lebaran. Rida juga mengajak pegawai Ditjen Gatrik untuk kembali aktif dalam melakukan tugas dengan menerapkan filosofi kerja CeCeP: cepat, cermat, dan produktif.

"Kecepatan harus diimbangi dengan kecermatan. Cepat dan cermat adalah satu pasangan yang tidak terpisahkan. Produktif punya makna tidak sebatas mengeluarkan output, tapi juga outcome. Dan kalau bisa membawa *impact* bagi kemaslahatan negeri ini," Rida menyampaikan.



“Gatrik Awards ini dilakukan untuk memberi semangat dan motivasi kita semua agar terus meningkatkan kinerja kita dan saling berlomba dalam kebaikan. Ini akan dilakukan secara rutin ke depan. Kerja kita adalah kerja tim dan mari saling bahu-membahu dalam mencapai tujuan bersama,” tuturnya. Penghargaan ini diberikan kepada unit kerja yang telah menorehkan prestasi, baik dalam lingkup kinerja di lingkungan Ditjen Gatrik, Kementerian ESDM, maupun dalam lingkup nasional. Penyerahan Gatrik Awards dilanjut dengan penandatanganan komitmen pimpinan Ditjen Gatrik dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Ditjen Gatrik berkomitmen untuk menerapkan prinsip 4 *NOs* atau 4



Dalam kesempatan ini, Rida menyerahkan Gatrik Awards 2021 untuk memberikan apresiasi pada unit kerja yang berprestasi sebagai berikut:

- Penghargaan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi: Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan dan Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
- Penghargaan TOP 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik: Aplikasi PEDULI oleh Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan
- Penghargaan Top 46 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik: Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
- Penghargaan Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran Terbaik kategori Unit eselon II: Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
- Penghargaan Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran Terbaik kategori Unit eselon III: Subdit Data dan Informasi Ketenagalistrikan (Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan)
- Penghargaan Pengelolaan Data Capaian *Output* Terbaik ke-3 di lingkungan Kementerian ESDM: Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Tidak, yakni *no bribery* (tidak boleh ada suap-menyuap), *no kickback* (tidak boleh ada uang komisi), *no gift* (tidak boleh ada hadiah yang tak wajar), dan *no luxurious hospitality* (tidak boleh ada jamuan mewah/berlebihan). Menutup sambutannya, Rida berpesan agar pegawai Gatrik tetap mematuhi protokol kesehatan. “Saya ingatkan lagi untuk mengurangi mobilitas, hindari kerumunan, batasi waktunya, dan tetap gunakan masker. Tetap semangat dan tetap jaga imunitas,” pungkas Rida. (AMH)



Regulasi Aturan Jaringan Terbaru Optimalkan Potensi EBT

Dalam sistem itu banyak melibatkan banyak pihak yang memerlukan kerjasama satu sama lain, untuk itu diperlukan ada penegakan aturan main pelaksanaannya. Dan ini merupakan salah satu cara PT PLN untuk menjamin program Anti Black Out System bisa berjalan

RIDA MULYANA

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan regulasi terbaru terkait Aturan Sistem Jaringan Tenaga Listrik. Melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 tahun 2020 tentang Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik (Grid Code), pemerintah berharap PT PLN (Persero) dapat mengoptimalkan potensi pembangkit tenaga listrik dari Energi Baru Terbarukan (EBT).

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana pada Webinar Sosialisasi Aturan Sistem Jaringan Tenaga Listrik yang diselenggarakan secara virtual, Kamis (29/4/2021), mengatakan bahwa regulasi ini bertujuan untuk mengupayakan pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik yang aman, andal, dan efisien serta melakukan transisi energi kearah yang lebih bersih dan berkelanjutan. Ia mengatakan, salah satu poin utama dari regulasi ini adalah penambahan substansi pengaturan pembangkit EBT dalam sistem jaringan tenaga listrik mulai dari tahapan penyambungan hingga pengoperasian untuk memastikan bahwa keandalan sistem dapat dipertahankan dalam rangka memenuhi kebutuhan penyediaan tenaga listrik untuk masyarakat.



Pemerintah berharap PT PLN (Persero) dapat mengoptimalkan potensi pembangkit tenaga listrik dari Energi Baru Terbarukan (EBT).



Upaya pemerintah dan PT PLN (Persero) dalam optimalisasi potensi EBT ini disebut Rida juga sejalan dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap efektivitas program peningkatan kontribusi EBT dalam Bauran Energi Nasional. Salah satu rekomendasi yang diberikan kepada Kementerian ESDM adalah melakukan review Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik (*Grid Code*) untuk mengakomodir penggunaan pembangkit EBT termasuk EBT *intermittent*, seperti PLTS dan PLTB.

“Jadi selain aman, andal, efisien, pada peraturan ini juga ada pengaturan pembangkit EBT, agar pembangkit EBT yang kedepan makin banyak masuk ke sistem tidak mengganggu keamanan, keandalan, dan efisien tenaga listrik yang sudah ada,” ucap Rida.

Sebagai informasi, Grid Code merupakan serangkaian aturan, persyaratan, dan standar yang bersifat dinamis dan adaptif untuk memastikan jaringan sistem tenaga listrik aman, andal, dan efisien dalam memenuhi peningkatan kebutuhan penyediaan tenaga listrik. Hingga saat ini, Kementerian ESDM telah menerbitkan empat Peraturan Menteri ESDM dan satu Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan terkait *Grid Code*.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2020 tentang Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik yang telah diterbitkan pada 30 Desember 2020 merupakan pembaharuan dan penyederhanaan Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik yang telah diterbitkan sebelumnya.

Dalam aturan ini terdapat lima lampiran yang mengatur masing-masing sistem tenaga listrik, yaitu: Sistem Tenaga Listrik Jawa, Madura, dan Bali, Sistem Tenaga Listrik Sumatera, Sistem Tenaga Listrik Sulawesi, Sistem Tenaga Listrik Kalimantan, dan Sistem Tenaga Listrik Nusa Tenggara-Maluku dan Papua.

Menurut Rida, selain mengakomodasi potensi EBT dalam jaringan tenaga listrik, regulasi ini juga mengatur substansi penegakan pelaksanaan *Grid Code* oleh seluruh pemakai jaringan dan pelaksanaan investigasi atas ketidakpatuhan yang akan berdampak pada keandalan sistem. Penegakan pelaksanaan *Grid Code* dan investigasi terhadap ketidakpatuhan tersebut menjadi salah satu tools PT PLN (Persero) untuk memastikan program “*Anti Black Out System* pada tahun 2025.”

“Dalam sistem itu banyak melibatkan banyak pihak yang memerlukan kerjasama satu sama lain, untuk itu diperlukan ada penegakan aturan main pelaksanaannya. Dan ini merupakan salah satu cara PT PLN untuk menjamin program *Anti Black Out System* bisa berjalan,” tutup Rida. (UH/PSJ)



Langkah Daur Ulang



Langkah Menanam Pohon



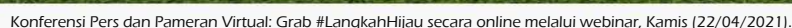
Langkah Kurangi Emisi



MENTERI ARIFIN:

PERLUNYA EKOSISTEM YANG MASIF UNTUK BERALIH KE KBLBB

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin tasrif menyampaikan perlunya dukungan masif dari berbagai pihak untuk membuat masyarakat beralih menggunakan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Konferensi Pers dan Pameran Virtual: Grab #LangkahHijau secara *online* melalui webinar, Kamis (22/04/2021). Acara ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.



SINERGI PEMULIHAN LISTRIK NTT, KEMENTERIAN ESDM TERJUNKAN INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN

Tim Inspektur Ketenagalistrikan terjun langsung ke lapangan untuk memantau pemulihan instalasi tenaga listrik yang terdampak bencana alam di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada awal April, Badai Siklon Tropis Seroja yang menerjang wilayah NTT menyebabkan terganggunya pasokan listrik di daerah tersebut. Inspeksi Tim Inspektur Ketenagalistrikan dilakukan mulai Rabu (14/04/2021) hingga Minggu (18/04/2021) di wilayah kerja PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) NTT.

“Dengan memperhatikan situasi pandemi Covid-19 terkini, inspeksi dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti prosedur keselamatan kerja di lingkungan PT PLN (Persero) UIW Nusa Tenggara Timur,” ujar Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Wanhar, Kamis (15/04/2021), di Jakarta.

Berdasarkan laporan Tim Inspektur Ketenagalistrikan per 15 April 2021 pukul 13.00 WITA, sejumlah 2.201 (55%) Gardu Distribusi telah dinormalkan dari total 4.002 gardu yang padam. Koordinator Inspektur Ketenagalistrikan Yunan Nasikhin menyampaikan sebanyak 360.970 (56,8%) pelanggan telah dipulihkan dari total 635.979 total pelanggan yang padam, dan 958 (54,4%) desa terdampak telah kembali normal dari total 1.759 desa yang padam.

Meskipun demikian, pemadaman masih terjadi di beberapa tempat. Yunan menyebut hal ini disebabkan karena ada Tower Transmisi 70 kV yang roboh.

“Robohnya tower transmisi ini mengakibatkan daya listrik dari PLTU 2x16 MW Bolok hanya dapat disalurkan

terbatas melalui penyulang 20 kV,” ujar Yunan.

Khusus untuk area Kupang, Yunan mengatakan sebesar 56,9% penyulang telah dinormalkan dari total 93 penyulang yang padam. Ia menambahkan, “Dari total 2729 Gardu Distribusi yang padam, 36,2% Gardu Distribusi telah pulih. Lalu sebesar 40,6% pelanggan juga telah dinormalkan dari total pelanggan 466.912 pelanggan yang padam.”

Pemulihan kondisi kelistrikan di NTT melibatkan 556 personel dan relawan yang terdiri dari 322 personel lapangan rekanan PLN, 190 personel bantuan PLN, dan 44 personel PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kupang. (AMH)

Tim Inspektur Ketenagalistrikan memantau pemulihan instalasi tenaga listrik yang terdampak bencana alam di Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (14/04/2021) hingga Minggu (18/04/2021).



PEMERINTAH DORONG MODERNISASI SISTEM TENAGA LISTRIK MELALUI SMART GRID

Pemerintah Indonesia mendorong modernisasi dan pemutakhiran sistem kelistrikan di Indonesia sehingga penetrasi pembangkit listrik berbasis energi terbarukan dapat lebih ditingkatkan. Pemutakhiran tersebut dilakukan melalui digitalisasi di semua infrastruktur ketenagalistrikan baik pembangkitan, transmisi, dan distribusi atau yang dikenal dengan jaringan cerdas (*smart grid*). Hal tersebut disampaikan Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu pada diskusi PJCI - Pamerindo *EnergyTalk 9 Series - SCADA Upgrading: Enabling a Smarter Grid toward Low Carbon Energy System*, Kamis (29/04/2021).

Menurut Jisman, *Smart Grid* tidak selalu diartikan sebagai sebuah modernisasi pada pembangkitan, transmisi, dan distribusi dalam satu kesatuan, namun dapat juga berdiri sendiri berupa modernisasi hanya di tempat tertentu. Menurutnya teknologi smart grid memungkinkan partisipasi pelanggan dalam penyediaan tenaga listrik dengan memasang pengukur pintar komunikasi dua arah.

"Ke depan, konsumen akan bertransformasi menjadi prosumer atau konsumen yang mampu menghasilkan listrik sendiri secara mandiri, baik dengan *Solar Home System* maupun Mikrohidro," ungkap Jisman.

Dalam kesempatan tersebut, Jisman menyampaikan capaian rasio elektrifikasi Indonesia akhir tahun 2020 yang mencapai 99,20%. Hal ini disebutnya sebagai lompatan besar dari kisaran 53% pada tahun 2000 yang lalu. Ia mengatakan, bahwa strategi penyediaan tenaga listrik yang dilakukan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi tersebut adalah dengan pendekatan Grid dan Off-Grid. Khusus untuk daerah

3T, strategi yang dilakukan adalah *Grid Extension* untuk wilayah yang dekat dengan *eksisting grid*, pemanfaatan energi baru terbarukan setempat dengan pembangunan jaringan komunal, serta dengan bantuan *battery storage* (tabung listrik) untuk masyarakat hidup tersebar (*scattered*). "Dengan penggunaan *Smart Grid*, banyak keuntungan yang didapat Indonesia. Diantaranya membantu pencapaian target energi terbarukan sebesar 23%, peningkatan integrasi VRE yang akan mendorong penyebaran target energi terbarukan dalam bauran energi, dan terakhir peningkatan pembangunan infrastruktur kendaraan listrik, termasuk Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dalam menciptakan permintaan atau demand baru untuk mengatasi masalah kelebihan daya," ucap Jisman.

Sebagai informasi, *Smart Grid* dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJPM) sudah ditetapkan dalam pengembangan sistem di Jawa Bali. Targetnya setiap tahun mulai tahun 2020 sampai 2024 diinstalasi lima sistem baru di Jawa Bali. Pengembangan *Smart Grid* juga dicantumkan dalam *Grand Strategi Energi Nasional* dan Draft rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT. PLN (Persero) yang saat ini sedang dalam tahap finalisasi.

Jisman mengapresiasi upaya PLN yang berhasil melakukan modernisasi infrastruktur ketenagalistrikan melalui digitalisasi dengan penerapan *Advanced Metering Infrastructure* (AMI) di Jakarta dan penerapan *Digital Substation* di proyek Sepatan II. Pada RUPTL PLN 2021-2030, PLN akan membangun *smart grid* di beberapa lokasi di Indonesia, di antaranya *Smart Community Project*, *Implementasi Automatic Dispatch System* (ADS), *Smart Micro Grid*, *Advanced Metering Infrastructure*, implementasi *trafo digital* dan sistem jaringan pintar lainnya. Ia juga mengapresiasi usaha-usaha dalam pengembangan jaringan cerdas seperti diskusi yang diselenggarakan oleh Prakarsa Jaringan Cerdas Indonesia (PJCI) ini.

"Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dari berbagai *stakeholder* khususnya PJCI yang telah membantu kami dalam mengidentifikasi dan menyatukan persepsi mengenai strategi pengembangan teknologi *Smart Grid* di Indonesia. Kami mengharapkan dukungan yang berkelanjutan untuk terus mengembangkan teknologi *Smart Grid* maupun teknologi baru lainnya di masa depan," ujar Jisman. (AT)



Diskusi PJCI - Pamerindo *EnergyTalk 9 Series - SCADA Upgrading: Enabling a Smarter Grid toward Low Carbon Energy System*, Kamis (29/04/2021).

KUNJUNGAN KERJA KE PLTU TANJUNG JATI B, PEMBANGKIT HARUS PERHATIKAN ASPEK LINGKUNGAN



Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana mendampingi Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke PLTU Tanjung Jati B di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Sabtu (8/4/2021).



<https://plntanjungjatib.blogspot.com/2016/03/truck-fly-ash.html>



<https://plntanjungjatib.blogspot.com/2019/10/pltu-tanjung-jati-b-jadi-andalan-pln.html>



<https://plntanjungjatib.blogspot.com/2019/07/sejarah-pltu-tanjung-jati-b.html>

Pembangkit tenaga listrik diharapkan terus memperhatikan aspek perlindungan lingkungan ketenagalistrikan. Salah satu pembangkit listrik yang diapresiasi karena berwawasan lingkungan adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati B yang berkapasitas daya total 4.863,6 MW. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana saat mendampingi Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke PLTU Tanjung Jati B di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Sabtu (8/4/2021).

Rida menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sesuai Paris Agreement. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong pemanfaatan teknologi untuk menghasilkan pembangkit tenaga listrik yang ramah lingkungan. Untuk itu Rida mengapresiasi PLTU Tanjung Jati B Jepara yang mendapatkan PROPER peringkat Emas selama 2 (dua) tahun berturut-turut di tahun 2019 dan 2020.

"Kami mendorong pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang ramah lingkungan melalui berbagai upaya salah satunya pemanfaatan *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA) di PLTU," ucap Rida.



https://4.bp.blogspot.com/-_i9W2tr2Wxs/V70xALecMil/AAAAAAAAAL0k/RR9TBtV9WrAHKXavHB2DNiLdqAnybaUwCPcBGAYYCw/s1600/go%2Bblue.jpg

Direktur Energi Primer PT. PLN (Persero) Rudy Hendra Prastowo yang turut hadir dalam kunjungan tersebut menyampaikan bahwa PLTU Tanjung Jati B dilengkapi dengan teknologi FGD (*Flue Gas Desulfurization*) untuk menurunkan kandungan Sulfur dalam emisi. Serta dilengkapi dengan ESP (*Electrostatic Precipitator*) untuk menangkap Abu Batubara *Fly Ash* Efisiensi FGD dalam menurunkan kandungan SO₂ pada emisi gas buang dapat mencapai 95%, sehingga SO₂ yang dikeluarkan melalui cerobong PLTU Tanjung Jati B Jepara hanya dikisaran 300 - 400 mg/Nm³. Dengan penerapan ini, PLN mampu memanfaatkan keunggulan keekonomian batubara sebagai penghasil energi listrik yang murah, namun tetap ramah bagi lingkungan.

Adanya Rencana *Leader Summit 22 - 23* April 2021 yang bertepatan dengan hari bumi juga disebut Rida Mulyana sebagai momentum Indonesia untuk mempromosikan *Green Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)*.

Selain itu, upaya pemerintah dalam mewujudkan lingkungan yang lebih bersih adalah dengan menyusun rancangan Perpres terkait NEK (Nilai Ekonomi Karbon) yang bertujuan untuk mendukung ETS (*Emission Trading System*).

Komisi VII DPR RI yang diwakili oleh Ketua Tim Bapak Ramson Siagian menyampaikan bahwa tujuan kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI adalah melakukan fungsi pengawasan dan mendengar aspirasi serta masukan terkait masalah ketenagalistrikan. Ia meminta agar Pemerintah bersama PLN dalam menyusun RUPTL lebih realistis terkait komitmen dalam mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

PLN jangan hanya melakukan bisnis *as usual* namun harus mempunyai komitmen dan strategi yang jelas terkait jaminan keamanan dan ketersediaan energi primer untuk pembangkit tenaga listrik dalam menghadapi perkembangan jaman

khususnya dalam menghadapi tantangan perubahan iklim,” ujar Ramson.

Seperti diketahui, PLTU Tanjung Jati B merupakan salah satu pembangkit yang memiliki nilai sangat strategis terutama untuk membantu memperbaiki kualitas tegangan pada sistem Jamali dan mengurangi losses transmisi pada transfer daya dari Jawa Bagian Timur ke Jawa Bagian Barat.

PLTU Tanjung Jati B menghasilkan 30.000 ton/bln *Fly ash*, dan 5.000 ton/bln *Bottom Ash* yang dimanfaatkan sebagai bahan baku industri oleh produsen semen. Selain itu FABA PLTU Tanjung Jati B juga telah diolah menjadi batako, paving, dan beton pracetak. Produk-produk tersebut, telah digunakan untuk kegiatan Bedah Rumah Tidak Layak Huni dalam program *Corporate Social Responsibility (CSR)* PLN di daerah Jepara. (PSJ)

KEMENTERIAN ESDM SAMBUT BAIK SPKLU SWASTA PERTAMA DI INDONESIA

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyambut baik masuknya perusahaan swasta dalam Percepatan Program Kendaraan Listrik. Hal ini dikemukakan oleh Koordinator Harga dan Tenaga Listrik Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Ferry Triansyah saat meninjau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) swasta pertama di Indonesia, Kamis (8/4/2021), di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta. Dua buah SPKLU percontohan berkapasitas 7 kW dan 11 kW di PIK ini dioperasikan oleh PT Starvo Global Energi. Saat ini, Starvo sudah memiliki dua puluh SPKLU yang tersebar di Jakarta dan Tangerang.



Koordinator Harga dan Tenaga Listrik Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Ferry Triansyah meninjau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) swasta pertama di Indonesia, Kamis (8/4/2021).



"Starvo adalah swasta pertama yang menjalankan SPKLU. Mudah-mudahan hal ini dapat mendorong swasta lain agar dapat meningkatkan infrastruktur SPKLU. Jangan ada kekhawatiran untuk produsen kendaraan listrik. Penjualan kendaraan listrik akan meningkat kalau ada infrastruktur SPKLU," ujar Ferry.

Co-founder Starvo Abdul Rahman Elly menjelaskan Starvo memfokuskan bisnis SPKLU di segmen real estate seperti perumahan, pusat perbelanjaan, rumah sakit, perkantoran, kampus, dan lainnya. "Di tahun 2021 ini kami menargetkan 1.000 lokasi SPKLU di Jawa-Bali. Hingga 2025, direncanakan ada 5.000 SPKLU di Jawa-Bali," kata Elly. Setelahnya, Elly mengatakan Starvo akan melebarkan bisnis ke Sumatera hingga Papua.

Tenaga Ahli Menteri ESDM Yurod Saleh yang turut hadir dalam acara tersebut memberikan apresiasi untuk Starvo atas inisiatifnya untuk masuk dalam bisnis SPKLU.



"Kami bersyukur Starvo sangat peduli dan tanggap terhadap program pemerintah terhadap elektrifikasi kendaraan. Ke depan harus kita laksanakan karena kita tahu bahan bakar migas akan habis. Semoga kendaraan listrik semakin memasyarakat karena Starvo menyediakan *charging*-nya," kata Yurod.

Untuk mendukung infrastruktur SPKLU, Starvo menghadirkan aplikasi yang dapat diunduh melalui *App Store* dan *Play Store*. Aplikasi ini dapat dengan cepat mengetahui SPKLU mana yang tersedia, berapa Rp/kWh, tipe nosel yang dibutuhkan, tata cara pembayaran melalui *e-wallet*, dan fitur lainnya yang mempermudah pengguna dalam mengisi daya kendaraan listriknya. (AMH)

JADI PELUANG BISNIS, KEMENTERIAN ESDM DORONG PENGOPERASIAN SPKLU

Pemerintah melalui Kementerian ESDM terus mendorong pengoperasian Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Indonesia. Pasaunya, SPKLU merupakan peluang bisnis yang dapat dimanfaatkan baik oleh produsen dalam negeri maupun Badan Usaha. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari pada *Focus Group Discussion* (FGD) Upaya untuk Mendorong Pengoperasian Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum yang diselenggarakan secara virtual, Selasa, [6/4/2020].

“Melalui kerjasama antar instansi dan badan usaha, penyediaan dan pengoperasian secara komersial SPKLU di seluruh Indonesia dapat diakselerasi, sehingga semakin mudah masyarakat pengguna kendaraan listrik mengisi ulang baterai kendaraannya,” ucap Ida.

Sebagai upaya Pemerintah mewujudkan transisi energi menuju ekonomi rendah karbon dan mengurangi ketergantungan terhadap impor produk BBM, Kementerian ESDM terus mendorong infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) berupa instalasi listrik privat maupun Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU). Menurut Ida, belum banyaknya SPKLU yang beroperasi secara komersial menjadi tantangan yang harus dijawab badan usaha SPKLU maupun Pemerintah dalam upaya mendorong percepatan KBLBB.



Kementerian ESDM terus mendorong infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).



Data Kementerian ESDM menunjukkan, pada tahun 2020, telah terdapat total 100 unit SPKLU yang tersebar pada 72 lokasi antara lain SPBU dan SPBG, pusat perbelanjaan, perkantoran, area parker, serta perhotelan. Selain itu, terdapat sebanyak 11 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) yang tersebar pada 10 lokasi. Untuk tahun 2021 ini, ditargetkan sebanyak 190 unit SPKLU beroperasi dengan target KBLBB adalah sebanyak 1.865 unit. Sampai dengan Januari 2021, telah dibangun sebanyak 100 unit charging station yang tersebar pada 72 lokasi pada area antara lain SPBU dan SPBG, pusat perbelanjaan, perkantoran, area parker, serta perhotelan.

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk KBL berbasis Baterai dilaksanakan melalui penugasan kepada PT PLN (Persero). Namun demikian, dalam pelaksanaan penugasan tersebut, PT PLN (Persero) dapat bekerja sama dengan BUMN dan / atau Badan Usaha lainnya. SPKLU disediakan oleh Badan Usaha SPKLU, yaitu pemegang IUPTL terintegrasi dan pemegang IUPTL penjualan yang memiliki wilayah usaha untuk melakukan penjualan tenaga listrik di SPKLU.

Ida menyampaikan Skema Usaha SPKLU untuk Pemegang IUPTL Terintegrasi Wilayah Usaha (TWU) Lintas Provinsi (LP) sebagai *Provider*, dapat menggunakan lima skema yaitu:

1. *Provider, Owner, Self Operated* (POS0), dengan penyedia listrik, pemilik, dan pengoperasian SPKLU dilakukan oleh *Provider*;
2. *Provider, Owner, Privately Operated* (POS0), dengan penyedia listrik, pemilik peralatan SPKLU oleh *Provider* namun pengoperasian SPKLU oleh badan usaha lain pemegang IUJPTL;
3. *Provider, Privately Owned & Operated* (PPO0), dengan penyedia listrik oleh *Provider* namun pemilik dan pengoperasian SPKLU oleh badan usaha lain pemegang IUJPTL;
4. *Provider, Lease, Self Operated* (PLS0), dengan penyedia listrik dan pengoperasian oleh *Provider* namun peralatan SPKLU menyewa dari badan usaha lain, dan
5. *Provider, Lease, Privately Operated* (PLP0), dimana penyedia listrik oleh *Provider* namun menyewa peralatan SPKLU dan pengoperasian SPKLU oleh badan usaha lain pemegang IUJPTL;

SPKLU dan pengoperasian SPKLU oleh badan usaha lain pemegang IUJPTL; Selain itu, skema Usaha SPKLU untuk Pemegang IUPTL Penjualan Wilayah Usaha (PWU) Lintas Provinsi sebagai Retailer membeli tenaga listrik dari Pemegang IUPTL lain baik Lintas Provinsi (LP) maupun Non-Lintas Provinsi (NLP) adalah sebagai berikut:

1. *Retailer, Owner, Self Operated* (ROS0), dengan penyedia listrik, pemilik, dan pengoperasian SPKLU dilakukan oleh *Retailer*;
2. *Retailer, Owner Privately Operated* (ROPO), dengan penyedia listrik, pemilik peralatan SPKLU oleh *Retailer* namun pengoperasian SPKLU oleh badan usaha lain pemegang IUJPTL;
3. *Retailer, Privately Owned & Operated* (RPO0), dengan penyedia listrik oleh *Retailer* namun pemilik dan pengoperasian SPKLU oleh badan usaha lain pemegang IUJPTL;
4. *Retailer, Lease, Self Operated* (RLS0), dengan penyedia listrik dan pengoperasian oleh *Retailer* namun peralatan SPKLU menyewa dari badan usaha lain; dan
5. *Retailer, Lease, Privately Operated* (RLPO), dimana penyedia listrik oleh *Retailer* namun menyewa peralatan SPKLU dan pengoperasian SPKLU oleh badan usaha lain pemegang IUJPTL;

Sesuai Peraturan Menteri tersebut, Badan Usaha yang mendirikan SPKLU akan diberikan insentif antara lain keringanan biaya penyambungan dan/atau jaminan langganan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tingkat mutu pelayanan tenaga listrik dan/atau jaminan langganan tenaga listrik, serta Pembebasan Rekening Minimum selama dua tahun pertama kepada Badan Usaha SPKLU, Badan Usaha SPBKLU, dan pemilik Instalasi Listrik Privat yang digunakan untuk pengisian listrik angkutan umum.

"Sebagai insentif tambahan, PLN juga merencanakan untuk pemberian diskon tarif tenaga listrik untuk pengisian KBL BB pada waktu luar beban puncak, yaitu antara pukul 22:00 s.d. 04:00, pada saat kurva beban PLN rendah," tutup Ida. (U)

STIMULUS KETENAGALISTRIKAN BERLANJUT, PEMERINTAH PASTIKAN MEKANISME PENYALURANNYA SIAP



Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana menyampaikan perpanjangan pemberian stimulus covid19 dari sektor ketenagalistrikan sampai dengan bulan Juni 2021 di Jakarta, Minggu (4/4)

Pemerintah memutuskan untuk tetap memberikan stimulus sektor ketenagalistrikan kepada masyarakat dan pelaku usaha akibat pandemi covid-19. Stimulus keringanan berupa diskon tarif tenaga listrik, dan pelaksanaan pembebasan biaya beban atau abonemen, serta pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum diperpanjang pada periode triwulan II tahun 2021.

Terkait dengan hal tersebut, PT PLN (Persero) telah menyampaikan kesiapannya sehingga stimulus periode Bulan April hingga Juni 2021 sudah tersedia dan bisa dinikmati oleh pelanggan.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengungkapkan bahwa Pemerintah terus berkomitmen memberikan stimulus untuk meringankan beban masyarakat tidak mampu dan rentan, serta kelompok industri dan komersial dalam menghadapi masa pandemi COVID-19. PT PLN (Persero) disebutkan telah siap dengan mekanisme penyalurannya.

"Pemerintah memperpanjang pemberian stimulus covid19 dari sektor ketenagalistrikan sampai dengan bulan Juni 2021 dengan harapan dampak dari pandemi Covid19 akan membaik," ujar Rida, di Jakarta, Minggu (4/4) Rida menekankan, stimulus tarif tenaga listrik yang diberikan oleh Pemerintah ini bersifat sementara, dan bukan merupakan bantuan yang permanen. Mulai triwulan II tahun 2021, stimulus yang diberikan adalah sebesar 50 persen dari stimulus yang diterima sebelumnya.

"Terdapat beberapa perbedaan mekanisme pemberian stimulus yang harus dipahami oleh masyarakat. Terima kasih PLN yang sudah memiliki pengalaman untuk menyalurkan stimulus sebagai bentuk kehadiran negara," lanjut Rida.

Sementara itu, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN, Agung Murdifi mengatakan bahwa stimulus periode bulan April hingga Juni 2021 sudah tersedia dan bisa dinikmati oleh pelanggan. Seperti program sebelumnya, penerima stimulus listrik dengan skema perpanjangan diskon bagi pelanggan subsidi yakni pelanggan rumah tangga dengan daya listrik 450 VA dan 900 VA bersubsidi. Selain itu juga ada pelanggan bisnis kecil dengan daya listrik 450 VA dan industri kecil daya listrik 450 VA.

Untuk pelanggan Pra Bayar akan mendapatkan diskon tarif listrik pada saat melakukan transaksi pembelian token listrik, sementara untuk pelanggan Pasca Bayar diskon diberikan dengan langsung memotong tagihan rekening listrik.



Mekanisme stimulus tarif tenaga listrik periode April - Juni 2021, yaitu:

1. Pelanggan golongan rumah tangga daya 450 VA, bisnis kecil daya 450 VA dan industri kecil daya 450 VA diberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen dengan maksimal penggunaan 720 jam nyala.
2. Pelanggan golongan rumah tangga daya 900 VA bersubsidi diberikan diskon sebesar tarif listrik 25 persen dengan maksimal penggunaan 720 jam nyala.
3. Pembebasan biaya beban atau abonemen, serta pembebasan ketentuan rekening minimum sebesar 50 persen bagi pelanggan reguler dan layanan khusus untuk keperluan industri, bisnis, dan sosial.

"Kami kembali mengingatkan, khususnya bagi pelanggan daya 450 VA pasca bayar, karena adanya perubahan besaran diskon stimulus maka mulai rekening bulan April 2021, pelanggan harus kembali melakukan pembayaran," tutur Agung.

Agung menambahkan, untuk pelanggan 450 VA pra bayar, karena adanya perubahan besaran diskon stimulus, pelanggan tidak perlu lagi mengakses token baik melalui web, layanan whatsapp, maupun PLN Mobile, diskon stimulus didapatkan pada saat melakukan transaksi pembelian token.

PLN berharap hadirnya stimulus listrik dapat meningkatkan produktivitas pelaku usaha serta daya beli masyarakat guna memulihkan perekonomian nasional. Untuk memberikan layanan kepada pelanggan terkait stimulus, PLN membuka saluran pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile yang dapat diunduh melalui Playstore atau AppStore. (RZ/PSJ)

DITJEN KETENAGALISTRIKAN MENYUSUN SOP PENGELOLAAN FABA

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (Dirjen Gatrik) Rida Mulyana menyampaikan penyusunan *standar Operating Procedure* (SOP) pengelolaan *fly ash dan bottom ash* (FABA) yang disusun bersama-sama dengan pelaku usaha telah masuk tahap finalisasi. Rida menyampaikan hal tersebut dalam webinar bertajuk Potensi Pemanfatan FABA Sumber Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kamis (1/4/2021), yang diselenggarakan oleh Ruang Energi.



Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan bersama pemangku kepentingan menyusun standar Operating Procedure (SOP) pengelolaan fly ash dan bottom ash (FABA) yang saat ini memasuki tahap finalisasi.





"SOP pengelolaan FABA ini nantinya dapat dijadikan acuan bagi seluruh kegiatan PLTU dalam mengelola FABA. Dengan demikian FABA akan dikelola dengan baik, sehingga selain aman bagi lingkungan, juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara," ujar Rida. Penyusunan SOP ini juga merupakan komitmen dari sektor untuk mewujudkan kondisi yang ramah lingkungan.

Rida menyebut dalam draft Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, penambahan pembangkit listrik dalam 10 tahun ke depan mencapai 41 GW. Dari jumlah tersebut, PLTU masih mendominasi sekitar 36% atau 14-15 GW.

"Memperhatikan kondisi penyediaan tenaga listrik saat ini, PLTU batubara merupakan pembangkit listrik pemikul beban dasar (*base load*) yang akan beroperasi terus-menerus selama 24 jam dan menjadi tulang punggung pasokan tenaga listrik nasional," Rida mengatakan.



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, FABA dari kegiatan PLTU tidak lagi masuk menjadi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Rida menyampaikan hal tersebut sesuai dengan hasil uji karakteristik beracun *Toxicity Characteristic Leaching Procedure* (TCLP) dan *lethal dose LD-50*. Di samping itu, hasil uji kandungan radionuklida pada FABA PLTU juga menunjukkan nilai konsentrasi zat pencemar lebih rendah dari tingkat kontaminasi radioaktif yang dipersyaratkan.

"Dengan dikeluarkannya FABA dari limbah B3, maka akan semakin terbuka luas pemanfaatan FABA," tutur Rida. Ia mengatakan perlu adanya akselerasi pemanfaatan FABA yang dapat berupa dukungan kebijakan yang dapat mendorong pemanfaatan FABA secara masif, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi negara dan mengurangi permasalahan lingkungan akibat jumlah timbunan FABA.

Rida lalu mengutip data Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) tahun 2020 yang menyatakan penggunaan beton dengan campuran FABA secara ekonomi dapat menurunkan biaya dibandingkan dengan biaya untuk membuat beton konvensional. Rida melanjutkan hal tersebut memberikan efisiensi anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp4,3 triliun sampai dengan tahun 2028, serta berpotensi menyerap tenaga kerja pada usaha kecil dan mikro.



Pengelolaan FABA Harus Terapkan Prinsip Berwawasan Lingkungan

Dalam kesempatan yang sama, Suyud Warno Utomo dari Universitas Indonesia menyampaikan pemanfaatan FABA memiliki beberapa keuntungan, dilihat dari sisi lingkungan (pengurangan emisi limbah, pengurangan lahan *landfill*), sisi ekonomi (pengurangan biaya pengolahan limbah dan bernilai jual), serta sisi produk (sebagai campuran material/meningkatkan kekuatan bahan). Namun ia menyampaikan pemanfaatan FABA untuk berbagai keperluan tidak berarti bebas tanpa batas.

Senada, Rida Mulyana menegaskan pelaku usaha harus bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan FABA dengan mengedepankan prinsip berwawasan lingkungan. Ia menyebut pelaku usaha juga wajib memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan aturan turunannya yang tengah disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

PEMERINTAH DUKUNG PENGEMBANGAN SDM KETENAGALISTRIKAN HADAPI INDUSTRI 4.0



Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia mengarah ke pembangunan yang berkelanjutan yaitu mengutamakan pemanfaatan sumber energi yang ramah lingkungan. Untuk menjawab tantangan kemajuan sektor energi dan ketenagalistrikan di era digital dan industri 4.0, dibutuhkan kerja sama semua pihak yang didukung dengan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang tepat dan berkualitas serta adaptif terhadap perubahan teknologi yang cepat.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana pada acara Dies Natalis Institut Teknologi PLN ke 23, Kamis, (1/4/2021). Acara ini dilakukan secara online melalui webinar dengan tema “Peran Pendidikan Tinggi di Bidang Ketenagalistrikan”.

“Dengan Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), kualitas dan kompetensi tenaga teknik dari berbagai jalur akan mendapatkan pengakuan yang sama,” ungkap Rida.

Rida menjelaskan untuk mendapatkan pengakuan kompetensi, sebelumnya dilakukan uji kompetensi untuk kemudian mendapatkan sertifikat kompetensi. Pada jalur dunia kerja, sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan di Indonesia yang sesuai klasifikasi bidang dan subbidang usaha, telah dilaksanakan dari 20 tahun terakhir melalui uji kompetensi sesuai dengan Metodologi Sertifikasi Kompetensi Ketenagalistrikan (MSKK) dan standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK). Untuk Tenaga Kerja Asing (TKA), kompetensi terkait subsektor ketenagalistrikan telah diatur melalui jabatan tertentu yang dapat diduduki TKA dan selanjutnya dilakukan sertifikasi kompetensi.



Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana pada acara Dies Natalis Institut Teknologi PLN ke 23, Kamis, (1/4/2021).

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah menyusun peta jabatan ketenagalistrikan yang diluncurkan pada tanggal 29 Oktober 2018. Dari peta jabatan ketenagalistrikan sampai tahun 2020, terdapat 1400 jabatan dari level 1 sampai dengan level 9 yang telah sesuai dengan KKNi. Dan jumlah unit kompetensi yang tersedia sebanyak 1.674 unit kompetensi. Pemetaan jabatan bidang ketenagalistrikan dibagi berdasarkan area pekerjaan, yaitu area pembangkitan, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik. Kemudian pada masing-masing area terdiri dari beberapa jenis pekerjaan, diantaranya adalah konsultasi, pembangunan dan pemasangan, pemeriksaan dan pengujian, pengoperasian, dan pemeliharaan.

Untuk sertifikasi kompetensi jalur pendidikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah melakukan MoU bersama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah terkait pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi yang link and match dengan industri. Selanjutnya dilakukan sertifikasi kompetensi kepada peserta didik kejuruan secara portofolio melalui badan usaha jasa penunjang tenaga listrik.

Sertifikasi kompetensi dalam perguruan tinggi dilakukan melalui Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB). PMMB adalah program yang dapat memberikan pengayaan wawasan dan keterampilan kepada mahasiswa, untuk mempersiapkan dan menciptakan SDM Indonesia yang unggul dalam menghadapi persaingan global melalui *link and match* antara industri subsektor ketenagalistrikan dan perguruan tinggi.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor IT PLN Iwa Garniwa Mulyana menyampaikan bahwa seluruh civitas akademika IT PLN terus berusaha untuk menjadikan lulusan yang siap bekerja dengan baik. “Untuk itu, kami perlu insight dan masukan dari Dirjen Ketenagalistrikan tentang bagaimana kondisi ketenagalistrikan di Indonesia,” ujar Iwa.

Rida menambahkan bahwa perkembangan teknologi yang semakin cepat saat ini, suka tidak suka akan mempengaruhi pengembangan subsektor ketenagalistrikan baik bisnis penyediaan tenaga listrik maupun kebutuhan SDM-nya. Semua pihak sesuai dengan perannya masing-masing harus menyiapkan diri dalam menghadapi berbagai macam perubahan dan tantangan yang ada terkait dengan subsektor ketenagalistrikan.

“Harapan kami semoga IT PLN sebagai salah satu perguruan tinggi yang memiliki peranan penting dalam pembangunan dan pengembangan subsektor ketenagalistrikan di Indonesia terus mampu mencetak lulusan yang berkualitas, memiliki kompetensi, dan berintegritas dalam menghadapi tantangan2 subsektor ketenagalistrikan di masa depan,” tutup Rida. (U)



UPAYA DUKUNG PEMERINTAH, INDOCEMENT BERKOMITMEN TURUNKAN EMISI GAS RUMAH KACA



Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari saat mendampingi Anggota Komisi VII DPR RI dalam kunjungan kerja ke pembangkit listrik PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) yang berlokasi di Citeureup, Bogor, Jawa Barat, Kamis (1/04/2021).

Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari mendampingi Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam kunjungan kerja ke pembangkit listrik PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) yang berlokasi di Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kamis (1/04/2021). Kunjungan kerja ini juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dadan Kusdiana, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji, Direktur Utama PT Pertamina EP (Persero), Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura, dan Bali Haryanto WS, Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Kunjungan kerja ini dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan serta menyerap aspirasi dan melihat secara langsung perkembangan sektor energi khususnya penggunaan energi primer untuk listrik dan penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) di INTP. Ini khususnya terkait penggunaan energi untuk kegiatan industri yang dapat mendukung penurunan emisi dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC) serta pencapaian target bauran EBT nasional sebesar 23% pada Tahun 2025.

INTP memiliki total 13 pabrik dengan total kapasitas produksi tahunan sebesar 24,9 juta ton semen. Lokasi 3 pabrik semen milik Indocement tersebar di daerah Citeureup (Bogor, Jawa Barat), Cirebon (Jawa Barat), dan Tarjun (Kalimantan Selatan).

Pembangkit listrik yang dioperasikan berasal dari 1-unit *aero derivatie gas turbine* (ADGT) untuk menyuplai 73 MW. Unit pembangkit listrik tersebut memasok listrik dari *steam turbine* ke kompleks Pabrik Citeureup. Listrik yang berasal dari *gas turbine* tersebut digunakan untuk back up energi listrik. INTP di Citeureup juga tengah melakukan pengembangan proyek penghematan energi melalui fasilitas pengolahan limbah menjadi bahan bakar atau *Refuse-Derived Fuel* (RDF). Proyek ini dilakukan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat, dimana saat ini Pemda sedang membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi RDF di desa Nambo yang berlokasi dekat dengan pabrik Indocement di Citeureup. Sampah yang diolah mampu menghasilkan bahan bakar kurang lebih 500 ton sehari.

Sejalan dengan kegiatan pengurangan emisi karbon dan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam *Paris Agreement*, komitmen INTP terwujudkan melalui penggunaan bahan bakar dan material alternatif yang bersumber dari pemanfaatan biomassa dalam proses pembakaran di klin yang merupakan CO2-neutral.

Direktur Utama PT. INTP Christian Kartawijaya mengatakan "Indocement memiliki komitmen berkontribusi dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca dan pencapaian target bauran EBT nasional."

Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui NDC berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar 29% pada tahun 2030. Sesuai amanah PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, Indonesia memiliki target bauran EBT pada tahun 2025 sebesar 23%.

Christian juga mengungkapkan "Kami sebagai pelaku industri mengharapkan adanya kemudahan dalam perizinan dan insentif Pemerintah mengingat besarnya biaya investasi." (AT)



PEMERINTAH TERBITKAN ATURAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN TURUNAN UU CIPTA KERJA

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Regulasi tersebut adalah turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan aturan baru ini, Pemerintah menetapkan perizinan menggunakan pendekatan berbasis risiko untuk menetapkan jenis perizinan berusaha pada seluruh sektor usaha.

"Setiap Kementerian dan Lembaga melakukan analisis tingkat risiko dan menetapkan tingkat risiko usaha yaitu tingkat risiko Rendah, Menengah atau Tinggi sehingga dapat mempercepat dan mempermudah pembukaan usaha, serta dapat menciptakan kepastian usaha," jelas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana, dalam Webinar Perizinan Berusaha Ketenagalistrikan Pasca Pemberlakuan Undang Undang Cipta Kerja, Rabu (24/3).

Secara umum peraturan ini juga mengatur pembagian kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pelaksanaan pengawasan yang diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja.

Rida menyampaikan substansi pengaturan pembagian kewenangan pusat dan daerah yang diatur dalam PP ini antara lain: kewenangan Pemerintah Pusat pada usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, kepentingan sendiri, jasa penunjang tenaga listrik, dan kewenangan Pemerintah Pusat pada bentuk penetapan atau persetujuan.

"Regulasi ini juga mengatur kewenangan Pemerintah Provinsi pada usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, kepentingan sendiri, serta jasa penunjang tenaga listrik untuk jasa penunjang tenaga listrik yang akan dijelaskan secara lebih detail oleh narasumber," ujar Rida.

Selain PP Nomor 5 Tahun 2021, Pemerintah juga telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. "PP ini mengatur tentang jenis perizinan berusaha untuk kegiatan usaha di semua sektor, di mana pengelompokan bidang usaha mengacu kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020," lanjut Rida.

Khusus untuk subsektor ketenagalistrikan, PP ini mengatur hal-hal sebagai berikut.

1. Penyediaan dana dalam usaha penyediaan tenaga listrik
2. Pedoman penyusunan rencana umum ketenagalistrikan
3. Penetapan wilayah usaha
4. Sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik
5. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum
6. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri
7. Tanggung jawab konsumen dalam usaha penyediaan tenaga listrik
8. Perhitungan kompensasi atas penggunaan tanah oleh pelaku usaha kegiatan penyediaan tenaga listrik
9. Keselamatan ketenagalistrikan, sertifikat laik operasi, Standar Nasional Indonesia (SNI), dan sertifikat kompetensi
10. Pemanfaatan jaringan tenaga listrik
11. Pembinaan dan pengawasan
12. Kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif. (DKD)



MENAKAR KESIAPAN INDONESIA MEMASUKI ERA KENDARAAN LISTRIK

Oleh: Pandu Satria Jati

Pranata Humas Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian

Kendaraan bermotor listrik sudah menjadi tren di berbagai negara di Dunia. Masyarakat internasional mulai sadar akan transportasi yang ramah lingkungan dengan meninggalkan Bahan Bakar Minyak (BBM) lalu menggantinya dengan energi listrik yang tersimpan dalam baterai sebagai tenaga penggerak. Bagaimana dengan Indonesia?

Penjualan mobil listrik di berbagai negara maju telah mengalahkan kendaraan konvensional. Sebagai contoh kendaraan listrik berbasis baterai di Norwegia yang pada 2020 lalu telah berkontribusi sebesar 54,3 persen dari seluruh penjualan mobil di negara tersebut. Tesla, perusahaan otomotif asal Amerika Serikat juga mencatatkan sejarah pada tahun 2020 secara resmi menjadi pembuat mobil paling berharga di seluruh dunia. Perusahaan milik Elon Musk ini berhasil mengalahkan Toyota Motor Corp dengan nilai pasar sebesar USD183,7 miliar sedangkan Toyota dengan nilai pasar USD178,78 miliar.

Tidak mau ketinggalan dengan negara-negara lain, saat ini Indonesia juga terus bergerak menuju era kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). Sejak dua tahun lalu Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Dengan payung hukum ini, diharapkan ekosistem kendaraan bermotor listrik dapat segera terbentuk dengan keterlibatan berbagai pihak.

Guna mendukung kebijakan Presiden tersebut, berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah telah menunjukkan komitmennya. Berbagai kemudahan bagi kendaraan listrik seperti insentif pajak kendaraan, bea balik nama, kemudahan kredit, pembebasan ganjil genap, dan berbagai insentif lain telah diatur untuk menarik minat masyarakat beralih ke kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.



Sumber foto: <https://otomotif.kompas.com/read/2021/01/06/193100415/penjualan-mobil-listrik-di-negara-ini-Hampai-mobil-konvensional>



Infrastruktur Disiapkan

Meskipun berbagai insentif telah diberikan, namun masyarakat Indonesia masih enggan berpaling ke kendaraan listrik. Selain harga beli yang masih tinggi, masih minimnya infrastruktur pengisian baterai juga menjadi salah satu kendala. Tidak lucu kalau keren-keren naik mobil listrik, tapi baterai habis di tengah kota dan tidak menemukan stasiun pengisian baterainya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang membidangi energi dan ketenagalistrikan telah menerbitkan aturan untuk mengatasi masalah minimnya charging station tersebut. Melalui Peraturan Menteri ESDM No.13 tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, Menteri ESDM Arifin Tasrif memberikan dasar hukum bagi bisnis Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU). Dalam regulasi ini diatur ketentuan ketenagalistrikan, tarif tenaga listrik, serta standar dan keselamatan ketenagalistrikan untuk SPKLU dan SPBKLU.

Hingga April 2021 telah terbangun 112 unit Charging Station pada 83 lokasi yang tersebar di beberapa area seperti SPBU, SPBG, perkantoran, perhotelan, pusat perbelanjaan, area parkir, maupun rest area di sepanjang jalur tol. Sesuai roadmap yang telah disusun, diharapkan pada tahun 2025 nanti dapat dibangun 3.861 SPKLU dengan jumlah KBLBB sebanyak 39.627 unit. Untuk SPBKLU sendiri diharapkan dapat terbangun 17.000 unit di tahun 2025.

Tarif isi daya listrik KBLBB di Indonesia juga relatif lebih murah dibandingkan dengan beberapa negara lain di dunia. Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020, tarif isi daya kendaraan listrik di SPKLU mengacu pada kategori tarif layanan khusus dengan berkisar antara Rp1.644,52—Rp2.466,78 per kWh. Hanya Tiongkok yang tarifnya lebih rendah daripada Indonesia. PT PLN (Persero) juga masih memberikan diskon tarif pengisian pada jam-jam tertentu. Dengan tarif pengisian kendaraan listrik yang murah tersebut, jika dibandingkan dengan kendaraan konvensional, untuk tipe tertentu KBLBB lebih hemat hingga lebih dari 4 kali.

Tarif isi daya listrik KBLBB di Indonesia juga relatif lebih murah dibandingkan dengan beberapa negara lain di dunia. Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020, tarif isi daya kendaraan listrik di SPKLU mengacu pada kategori tarif layanan khusus dengan berkisar antara Rp1.644,52 — Rp2.466,78 per kWh.





Dukungan Publik

Untuk mengakselerasi percepatan kendaraan listrik, Kementerian ESDM telah menginisiasi public launching kendaraan bermotor listrik pada 18 Desember 2020 lalu. Peluncuran publik program KBLBB ini dihadiri secara daring oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Kepala Staf Kepresidenan, Gubernur, pimpinan BUMN, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, dan media yang menjadi unsur-unsur pentahelix ekosistem KBLBB.

Inisiasi yang dilakukan Kementerian ESDM ini semata ingin sesegera mungkin menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang saat ini hampir separuhnya dipenuhi dengan impor. Dengan pertumbuhan kendaraan bermotor konvensional sekitar 10 juta unit pertahun, kebutuhan BBM terus meningkat mencapai 414 juta barel per tahun. Sebagian kebutuhan BBM domestik tersebut harus diimpor sehingga membebani neraca dagang Indonesia. Dengan mempercepat ekosistem kendaraan bermotor listrik, maka subsidi BBM bisa ditekan secara signifikan dan akhirnya dapat menghemat miliaran devisa.

Upaya Kementerian ESDM mengajak seluruh elemen bangsa menggunakan kendaraan bermotor listrik ini perlu diikuti kesadaran publik bahwa BBM yang kita gunakan untuk menggerakkan kendaraan kita berasal dari fosil yang seawaktu-waktu langka dan akan habis. Melalui bahan bakar listrik yang nantinya akan banyak dibangkitkan dari Energi Baru Terbarukan (EBT), kemandirian energi kita dapat terus terjaga.

Percepatan ekosistem KBLBB membutuhkan dukungan publik. Pemerintah telah menyiapkan segala sesuatu untuk menarik minat publik. Saatnya seluruh bangsa menyingkirkan ego untuk bersama-sama menyiapkan transportasi masa depan yang ramah lingkungan dan ramah devisa negara. Jika semua elemen bangsa siap, seperti halnya Indonesia siap menuju era kendaraan listrik.

DAFTAR REGULASI KOLEKSI PERPUSTAKAAN DITJEN KETENAGALISTRIKAN SEMESTER 1 TAHUN 2021

No.	Daftar Legislasi dan Regulasi Terbaru Koleksi Perpustakaan DJK	Status
1	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
2	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor energi dan Sumber Daya Mineral	
3	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah	Mencabut Peraturan Menteri energi dan Sumber Daya Mineral No. 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan
4	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan	Mencabut Peraturan Menteri ESDM No. 0045 Tahun 2005 Tentang Instalasi Ketenagalistrikan
5	Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 K/HK. 02/MEM.L/2021 tentang Pemberian Stimulus Tarif Tenaga Listrik Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dalam rangka Menghadapi Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	

CARA MENGECEK INFORMASI STIMULUS PROGRAM KETENAGALISTRIKAN MELALUI PLN MOBILE

1

Buka PLN Mobile dan pilih Info Stimulus

2

Masukkan nomor meter/ID pelanggan
dan klik kirim

3

Histori penerimaan stimulus selama masa
diskon tarif akan muncul

4

Untuk pelanggan prabayar akan muncul link
pembelian token melalui PLN Mobile dan memuat
informasi stimulus token yang diperoleh sebelumnya

5

Untuk pelanggan pascabayar akan muncul link untuk
membayar tagihan listrik dan memuat informasi
besaran stimulus yang didapatkan sebelumnya.



Sumber: PT PLN (Persero)



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
Jalan HR Rasuna Said Blok X2, Kav.7-8, Kuningan
Jakarta Selatan 12950
Telp. (021) 5225180, Fax (021) 5256044
www.gatrik.esdm.go.id